

**STUDI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PADA KAWASAN PERKOTAAN SUNGGUMINASA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RESTU YUSUF
NIM. 60800111066

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, April 2016
Penyusun,

RESTU YUSUF
NIM : 60800111066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Kawasan Perkotaan
Sungguminasa.

Nama Mahasiswa : Restu Yusuf

NIM : 60800111066

Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Syafri, M.Si

Nur Syam AS, ST, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Dr. Muhammad Anshar, S.Pt, M.Si
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa” yang disusun oleh Restu Yusuf, NIM: 60800111066, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risma Handayani, S.Ip., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Ir. Hamid Umar, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Mustari Mustafa, S.Ag., M.pd.	(.....)
Pembimbing I	: Ir. Syafri, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nursyam AS, ST., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 1993303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini berjudul **“Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa”**, yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian penelitian ini, tidak banyak hambatan yang didapatkan. Namun peneliti menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan hasil penelitian ini tidak lain berkat bantuan berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyetujui dan menerima proposal skripsi penulis.
2. Yth. Bapak Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt, M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Risma Handayani, S.Ip, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
3. Yth. Bapak Ir. Syafri, M.Si dan Bapak Nursyam AS, ST, M.Si., selaku dewan pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar memberikan masukan-masukan sejak awal bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Yth. Bapak Ir. H. Hamid Umar, M.Si., Bapak Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt, M.Si., dan Bapak Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd., selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini.
5. Senior-senior angkatan 06, 07, 08, 09, dan 010 terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalamannya baik selama masa perkuliahan maupun selama proses penelitian berlangsung.
6. Teman-teman “P.E.T.A” angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama masa perkuliahan yang penuh keceriaan dan saling membantu.
7. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih, dengan penuh kasih sayang dan penghargaan yang tulus kepada Ibunda dan Ayahanda, yang selalu setia dan tak putus-putusnya memanjatkan do’a selama ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Kami memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat menjadi masukan dan acuan penyusunan karya selanjutnya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan penulis dan para pembaca.

Samata - Gowa, April 2016

Restu Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Batasan Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Lahan.....	8
B. Kota dan Kawasan Perkotaan.....	14
C. Konsep Pengembangan Wilayah Perkotaan.....	19
D. Definisi Perubahan Fungsi Lahan (konversi lahan)	23
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan	25
F. Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non Pertanian	30
G. Peraturan Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian	33

H. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
C. Objek Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber data	37
1. Jenis Data	37
2. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	38
1. Pengumpulan Data Primer	38
2. Pengumpulan Data Sekunder.....	40
F. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel	41
G. Variabel Penelitian	42
H. Definisi Operasional.....	43
I. Metode Analisis Data	45
1. Alat Analisis untuk Rumusan Masalah Pertama.....	45
2. Alat Analisis untuk Rumusan Masalah Kedua	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gowa	48
a. Batas Administrasi dan Letak Geografis	48
b. Topografi	51
c. Kemiringan Lereng.....	52
d. Geologi	52
e. Jenis Tanah	57
f. Hidrologi.....	58

g. Klimatologi.....	61
2. Gambaran Umum kawasan Perkotaan Sungguminasa.....	67
a. Letak Geografis Wilayah.....	67
b. Keadaan Topografi	69
c. Keadaan Geologi	72
d. Keadaan Hidrologi.....	72
e. Jenis Tanah	75
f. Tata Guna Lahan	75
g. Kependudukan	77
B. Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	80
1. Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Tahun 2009, 2012 dan 2014.....	80
2. Pola Atau Tipologi Perubahan Pemanfaatan Lahan	87
3. Faktor – Faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	87
a. Faktor Kependudukan	88
b. Faktor Kebutuhan Lahan	90
c. Faktor Ekonomi	94
d. Faktor Sosial.....	98
e. Faktor Kebijakan	102
C. Tinjauan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Perkotaan Sungguminasa.....	107
1. Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Perkotaan Sungguminasa,.....	107
2. Pembagian Kawasan Pengembangan Perkotaan Sungguminasa.....	108
D. Tinjauan Al-Quran Terhadap Pemanfaatan Lahan	112

BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
 DAFTAR PUSTAKA	126
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	128

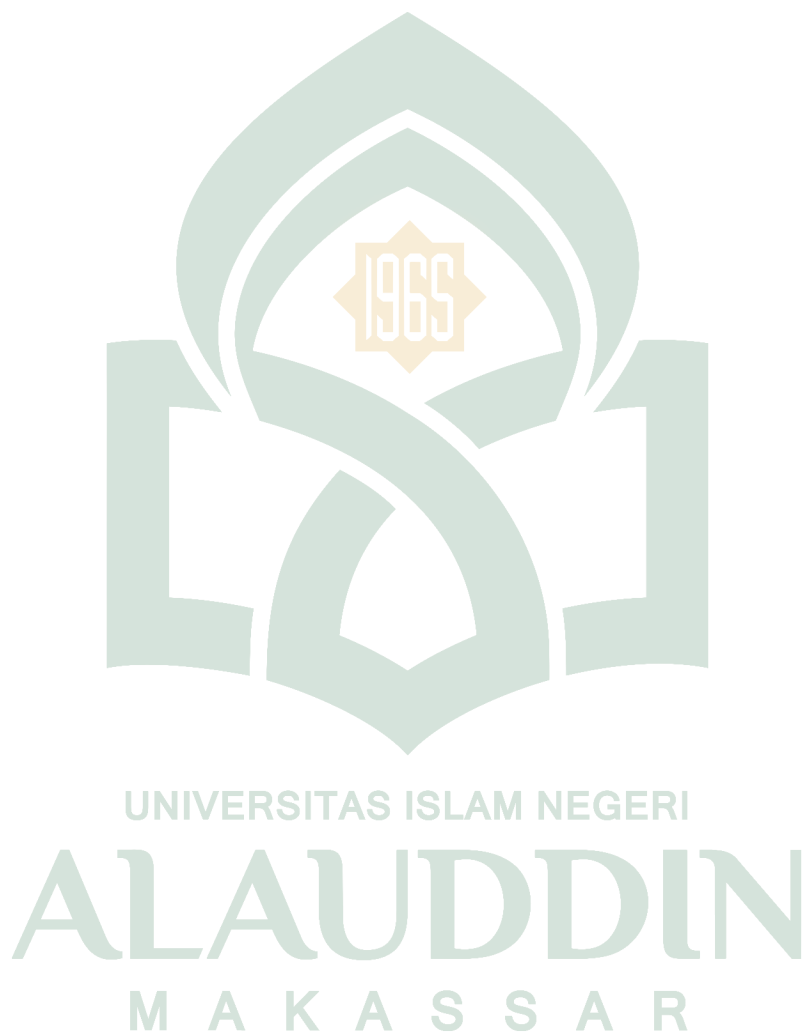


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Faktor – Faktor, Variabel dan Indikator Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian.....	43
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Gowa Dirinci Berdasarkan Kecamatan.....	51
Tabel 4.2	Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gowa Setiap Bulan	67
Tabel 4.3	Luas Kota Sungguminasa Berdasarkan Administrasi Wilayah Pemerintahan.....	68
Tabel 4.4	Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa.....	77
Tabel 4.5	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa	78
Tabel 4.6	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa	79
Tabel 4.7	Luasan Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Lahan Permukiman Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014	81
Tabel 4.8	Luasan Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014.....	83
Tabel 4.9	Luasan Perubahan Pemanfaatan Rumah/ Bangunan Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014.....	83
Tabel 4.10	Faktor–faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan.....	87
Tabel 4.11	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa	88
Tabel 4.12	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa	90

Tabel 4.13	Penilaian Responden Tentang Nilai Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	91
Tabel 4.14	Perhitungan Skor Akhir	92
Tabel 4.15	Penilaian Responden Tentang Lokasi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	93
Tabel 4.16	Perhitungan Skor Akhir	94
Tabel 4.17	Penilaian Responden Tentang Mata Pencarian Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	95
Tabel 4.18	Perhitungan Skor Akhir	96
Tabel 4.19	Penilaian Responden Tentang Tingkat Pendapatan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	97
Tabel 4.20	Perhitungan Skor Akhir	98
Tabel 4.21	Penilaian Responden Tentang Pengaruh Tetangga Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	99
Tabel 4.22	Perhitungan Skor Akhir	100
Tabel 4.23	Penilaian Responden Tentang Karakteristik Pemilik Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan	101
Tabel 4.24	Perhitungan Skor Akhir	102
Tabel 4.25	Penilaian Responden (Pemerintah Setempat) Tentang Kebijakan Pemerintah	102
Tabel 4.26	Penilaian Responden Tentang Kebijakan Pemerintah	103
Tabel 4.27	Perhitungan Skor Akhir	104
Tabel 4.28	Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan	105
Tabel 4.29	Rencana Pembagian Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Perkotaan Sungguminasa	98
Tabel 4.30	Rencana Fungsi Pelayanan Tiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Perkotaan Sungguminasa.....	99

Tabel 4.31 Rencana Fungsi Ruang Tiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Perkotaan Sungguminasa.....	100
--	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Faktor Pengaruh Konversi Lahan Pertanian	26
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa	50
Gambar 4.2	Peta Topografi Kabupaten Gowa	54
Gambar 4.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gowa	55
Gambar 4.4	Peta Geologi Kabupaten Gowa	56
Gambar 4.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Gowa	64
Gambar 4.6	Peta Hidrologi Kabupaten Gowa	65
Gambar 4.7	Peta Klimatologi Kabupaten Gowa	66
Gambar 4.8	Peta Delineasi Kawasan Perkotaan Sungguminasa	70
Gambar 4.9	Peta Topografi Kawasan Perkotaan Sungguminasa	71
Gambar 4.10	Peta Geologi Kawasan Perkotaan Sungguminasa	73
Gambar 4.11	Peta Hidrologi Kawasan Perkotaan Sungguminasa	74
Gambar 4.12	Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Sungguminasa	76
Gambar 4.13	Peta Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Permukiman Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009	84
Gambar 4.14	Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Permukiman Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2012	85
Gambar 4.15	Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Permukiman Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2012-2014	86
Gambar 4.16	Grafik Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir di Kawasan Perkotaan Sungguminasa	89

ABSTRAK

Nama : Restu Yusuf
NIM : 60800111066
Judul Skripsi : Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan
Sungguminasa
Pembimbing : 1. Ir. Syafri, M.Si
2. Nursyam Aksa, ST., M.Si

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan. Lahan suatu wilayah pada awalnya berupa lahan pertanian, maupun hutan, kemudian berubah dikarenakan kebutuhan lahan oleh masyarakat yang semakin meningkat, utamanya untuk kegiatan permukiman. Pembangunan perumahan/ permukiman yang terus dilakukan tentunya membutuhkan lahan yang cukup besar, belum lagi jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, sementara itu ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya tidak berubah.

Permasalahan yang cukup penting akibat perubahan penggunaan lahan pertanian terjadi di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Perluasan pembangunan Kawasan Perkotaan Sungguminasa menjadi alternatif pilihan untuk pengembangan kawasan pembangunan yang berimplikasi juga terhadap perubahan-perubahan lahan utamanya lahan pertanian. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa”. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan menggunakan metode analisis Skala Lickert.

Dari hasil analisis terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, yang didominasi oleh para pengembang yang membangun perumahan-perumahan baru dengan menyediakan aksesibilitas sebagai penunjang perumahan tersebut. Adanya perumahan-perumahan baru tersebut kemudian diikuti pembangunan rumah-rumah penduduk disekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan tersebut ialah faktor kependudukan, faktor kebutuhan lahan, faktor ekonomi dan faktor sosial.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Lahan Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Dibiidang pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian (Catur, 2010).

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Lahan suatu wilayah pada awalnya berupa lahan pertanian, maupun hutan, kemudian berubah dikarenakan kebutuhan lahan oleh masyarakat yang semakin meningkat, utamanya untuk kegiatan permukiman.

Pembangunan perumahan/ permukiman yang terus dilakukan tentunya membutuhkan lahan yang cukup besar, belum lagi jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, sementara itu ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya tidak berubah. Sumber daya lahan memiliki ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penawaran

lahan relatif terbatas sedangkan permintaannya tak terbatas, sehingga penggunaan sumber daya lahan akan mengarah kepada penggunaan yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi lebih besar bagi pemiliknya.

Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan peruntukan permukiman merupakan hal yang lazim. Dinamika yang terjadi pada masyarakat yang meliputi perkembangan penduduk dan pola pembangunan wilayah menyebabkan alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan utamanya peruntukan permukiman sebagai tempat tinggal, akan tetapi pelaksanaannya harus tetap dikendalikan demi keberlanjutan pemanfaatan lahan pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal ini dapat dilihat dalam Al – Qur'an pada surat Al-An'am [6] ayat 131 :

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya :

“Yang demikian itu adalah Karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.”

Menurut Quraish S (2011 : 671–672) dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Setelah Allah menampik semua alasan para pendurhaka dengan menegaskan pengutusan para rasul untuk memberi tuntunan dan peringatan, melalui ayat ini, Allah menjelaskan salah satu sebab pengutusan para rasul, yakni: *Yang demikian itu, yakni diutusnya para rasul, adalah karena Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-mu dan Pemelihara semua makhluk tidaklah*

membinasakan kota-kota dan penduduknya disebabkan kezaliman apapun yang mereka lakukan, yakni pelanggaran dan kedurhakaan yang dilakukan penduduk satu kota, *sedang penduduknya itu dalam keadaan amat lengah*, yakni tidak tahu dan tidak sadar tentang apa yang dikehendaki Allah dari mereka serta apa dampak dari ketaatan dan pelanggaran mereka.

Ayat ini merupakan salah satu bukti betapa kasih sayang dan keadilan Allah kepada makhluk-Nya. Ia juga merupakan salah satu prinsip dalam mempertanggungjawabkan sesuatu, yakni bahwa seseorang tidak dapat dituntut sebelum ada dan diketahuinya secara potensial hukum yang berlaku.

Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi perubahan penggunaan lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga berubah secara progresif. Permasalahan yang cukup penting akibat perubahan penggunaan lahan pertanian terjadi di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa yang meliputi Kecamatan Somba opu, sebagian wilayah Kecamatan Palangga dan satu Kelurahan pada wilayah Kecamatan Bontomarannu. Perluasan pembangunan Kawasan Perkotaan Sungguminasa menjadi alternatif pilihan untuk pengembangan kawasan pembangunan yang berimplikasi juga terhadap perubahan-perubahan lahan utamanya lahan pertanian. Selain itu, dampak lain yang muncul adalah terhadap sosial ekonomi masyarakat yang berada pada daerah yang tercakup dalam wilayah di sekitar Kawasan Perkotaan Sungguminasa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa”. Pemilihan lokasi penelitian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa didasarkan pada kenyataan bahwa Kawasan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pembangunan fisik yang pesat, utamanya pada sektor perumahan. Sehingga penelitian ini akan lebih mengarah pada perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi pertanian menjadi kawasan perumahan/ permukiman.

B. Rumusan Masalah

Kawasan Perkotaan Sungguminasa sedang mengalami pembangunan fisik yang pesat,. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pertanyaan:

1. Bagaimana pola perubahan pemanfaatan lahan pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa tahun 2009-2014?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian Kawasan Perkotaan Sungguminasa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gowa agar mengetahui perubahan penggunaan lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa.
- b. Untuk kegiatan penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian perubahan kawasan yang telah terbangun seperti permukiman sesuai dengan peruntukannya, bagaimana pengaruh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap perubahan penggunaan lahan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup wilayah studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa, adapun mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1. Ruang Lingkup Spasial (Wilayah)

Ruang lingkup spasial (wilayah) penelitian ini berada di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa, adapun wilayah yang mencakup Kawasan Perkotaan Sungguminasa meliputi Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Borongloe yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontomarannu serta Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Mangalli, Kelurahan Tetebatu, Kelurahan Parangbanoa, Desa Taeng, Desa Bontoala, dan Desa Je'netallasa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Palangga.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini difokuskan pada perubahan fungsi lahan pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

E. Batasan Penelitian

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian serta dengan adanya keterbatasan waktu pengerjaan maka perlu adanya batasan penelitian. Batasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa dan yang menjadi fokus utama adalah perubahan penggunaan lahan pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan, dimana sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang menjadi landasan, antara lain yaitu teori tentang lahan, teori kota dan kawasan perkotaan, teori penggunaan

lahan, teori perubahan penggunaan lahan, dampak dari perubahan pemanfaatan kawasan pertanian ke non-pertanian, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan, dan peraturan tentang perubahan penggunaan lahan pertanian serta kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian. Secara umum menguraikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kawasan Perkotaan Sungguminasa, dan gambaran umum Wilayah Kecamatan-Kecamatan yang termasuk Kawasan Perkotaan Sungguminasa yang meliputi kondisi fisik geografis dan luas wilayah, kondisi fisik alami seperti topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, serta kajian pemanfaatan lahan terhadap perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non-pertanian sebagai akibat pembangunan perumahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian lahan

Pengertian lahan (*land*) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, cair, dan bahkan benda gas. Pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat-sifat tersebut adalah berupa iklim, batuan dan struktur, bentuk lahan, dan proses, jenis tanah, tata air, dan vegetasi/tumbuhannya.

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain. (Haeruddin, 1997 : 6)

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan : tata guna lahan di kota. Sebagaimana

disebutkan di atas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia.(Jayadinata 1999 : 10).

Lahan adalah sebagai ruang (*space*) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumberdaya yang dapat dieksploitasi, di mana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya.

Menurut Jayadinata (1999) Pengertian lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga), misalnya dapat dikatakan : tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan diatas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudra dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia. Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam suatu hektar (ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan,

perkampungan, dan lain-lain (Haeruddin dalam Yunita Handayani Amelia, 1999:6).

1. Konsep pola pemanfaatan lahan

Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan permukiman. Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dalam usaha untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan sesuatu daerah, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuka klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis. Istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Kalasifikasi lahan didefenisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai

kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu di upayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu:

- a. Terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi tanah;
- b. Terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan.

Penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut: penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari di mana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah pengawasan lahan. Proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian. (Soemarwoto 1994 : 212).

2. Klasifikasi pemanfaatan lahan

Informasi penggunaan lahan yang ditetapkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraris/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun

1997. Secara garis besar klasifikasi penggunaan lahan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu penggunaan lahan perkotaan (*urban land use*) dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan urban meliputi perumahan, jasa (perkantoran, fasilitas umum), perdagangan, dan industri. Sedangkan penggunaan lahan non urban meliputi areal persawahan, kebun campuran, tegalan, tambak, hutan, semak belukar, alang-alang, dan padang rumput.

3. Faktor Pembentukan Pemanfaatan Lahan

Mengemukakan bahwa ruang kota sangat berkaitan dengan tiga sistem yaitu : sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan (alam). Ketiga sistem tersebut adalah :

- a. Sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dalam kelembagaannya mengatur unturnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang.
- b. Sistem pengembangan lahan berfokus pada proses perubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem.
- c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibandingkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan serta proses-proses dasar yang berkaitan dengan air, udara dan materi.

Kegiatan sistem tersebut menjadi dasar penyusunan lahan dan terbentuknya pemanfaatan lahan, tetapi yang tidak terjadi factor esensial yaitu kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan, keselamatan efisiensi, dan konservasi energi. Sedangkan menurut Jayadinata, faktor penentu dalam tata guna lahan adalah:

- a. Perilaku masyarakat. Tingkah laku dan tindak manusia dalam tata guna tanah disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia dalam kehidupan social maupun ekonomi, dalam kehidupan sosial misalnya, kemudahan; atau *convenience* sangat penting artinya; pengaturan lokasi tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat rekreasi adalah untuk kemudahan.
- b. Kehidupan ekonomi, dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya adalah penting, maka diadakan pengaturan tempat sekolah supaya ekonomis, program rekreasi yang ekonomis yang berhubungan dengan pendapatan perkapita dan sebagainya.
- c. Kepentingan umum. Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna tanah yang meliputi : kesehatan, keamanan, moral, dan kesejahteraan umum (termasuk kemudahan, keindahan, dan kenikmatan) sebagainya.

Dalam kupasan tata guna lahan di mana suatu kota yang telah ada hubungan dengan pengertian itu, penggunaan tanah terdiri dari atas

penggunaan bagian kelompok perumahan, industri, ruang terbuka, dan pendidikan, sehingga suatu kota dapat dianalisis.

B. Kota dan Kawasan Perkotaan

Definisi klasik kota menurut Rapoport dalam Zahnd (1999; 4) adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Dari definisi di atas, permukiman/kota digambarkan sebagai objek yang mempunyai elemen-elemen (aspek sosial) yang mempengaruhi kegiatan yang ada dan mungkin ada pada pembangunan selanjutnya. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat terus berkembang dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan dalam kota, kota tidak lagi mempunyai fungsi tunggal namun memiliki kecenderungan multi fungsi dengan fungsi kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pasar (wilayah) dan kepentingan publik. Sehingga kota dapat diartikan sebagai suatu lokasi dengan konsentrasi penduduk/permukiman, kegiatan sosial ekonomi yang heterogen dan intensif (bukan ekstraktif atau pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sosial ekonomi yang ditetapkan secara administratif. Jika kota adalah suatu wilayah yang ditetapkan secara administratif, perkotaan tidak terbatas pada penetapan administratif, namun berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Karakteristik kawasan perkotaan meliputi :

1. Memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa;
2. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kawasan Perkotaan dapat berbentuk :

- a) Kota sebagai daerah otonom; adalah kota yang dikelola oleh pemerintah kota;
- b) Kota yang menjadi bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; adalah kota yang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.
- c) Kota yang menjadi bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.

Kriteria Kawasan Perkotaan:

1. Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota
 - a) Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat diukur dari:
 - 1) PDRB (produk domestik regional bruto);
 - 2) Penerimaan daerah sendiri.
 - b) Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari:
 - 1) Lembaga keuangan;
 - 2) Sarana ekonomi;
 - 3) Sarana pendidikan;
 - 4) Sarana transportasi dan komunikasi;
 - 5) Sarana pariwisata;
 - 6) Ketenagakerjaan.
 - c) Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur dari:
 - 1) Tempat peribadatan;
 - 2) Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya;
 - 3) Sarana olahraga.

- d) Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat, yang dapat diukur dari:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
 - 2) Organisasi kemasyarakatan.
- e) Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
- f) Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah.
- g) Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari:
- 1) Keamanan dan ketertiban;
 - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - 3) Rentang kendali;
 - 4) Kotayang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan;

Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000.

Kriteria Umum Kawasan Perkotaan:

1. Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata
2. pencaharian penduduknya di sector perkotaan;
3. Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa;
4. Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar;

5. Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.

Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan

1. Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan;
2. Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kotamadya berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional;
3. Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa.

Kriteria Kawasan Perkotaan Baru

1. Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada;
2. Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;
3. Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana alam;
4. Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di sekitarnya;

5. Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten;
6. Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya;
7. Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurang-kurangnya 400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
8. Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.

C. Konsep Pengembangan Wilayah Perkotaan

Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktifitas masyarakat suatu wilayah perkotaan dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial (keruangan) lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut.

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya konsep pengembangan wilayah perkotaan yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu

meningkatkan kesejahteraan secara merata. Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah perkotaan yang didasarkan pada penataan ruang.

Kaitan dengan perihal diatas, ada tiga kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan desentralisasi (*Alkadri et all, Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999*). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Penerapan konsep ini di Indonesia telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan dalam RTRWN.

Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.

Pendekatan tersebut mempunyai berbagai kelemahan. Dari kondisi ini muncullah beberapa konsep untuk menanggapi kelemahan tersebut. Konsep tersebut antara lain *people center approach* yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, *natural resources-based development* yang menekankan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, serta *technology*

based development yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi konsep tersebut kurang berhasil dalam membawa kesejahteraan rakyat.

Fenomena persaingan antar wilayah, tren perdagangan global yang sering memaksa penerapan sistem *outsourcing*, kemajuan teknologi yang telah merubah dunia menjadi lebih dinamis, perubahan mendasar dalam sistem kemasyarakatan seperti demokratisasi, otonomi, keterbukaan dan meningkatnya kreatifitas masyarakat telah mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah. Dengan semakin kompleksnya masalah tersebut dapat dibayangkan akan sangat sulit untuk mengelola pembangunan secara terpusat, seperti pada konsep-konsep yang dijelaskan di atas.

Pilihan yang tepat adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang dikenal dengan *bubble economics*, sudah usang karena terbukti tak tahan terhadap gelombang krisis. Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah ber-*metamorfose* dari hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut (*Alkadri etal, 1999*).

Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara menerus. Menurut Porter (1990) dalam Tiga Pilar pengembangan Wilayah (1999) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun demikian, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari itu, yakni adanya inovasi untuk pembaruan. Suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui empat hal yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan inovasi, kesejahteraan masyarakat, dan besarnya investasi.

Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya yang mengandalkan tiga pilar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi elemen tersebut mencerminkan kinerja dari suatu wilayah. Kinerja tersebut akan berbeda dengan kinerja wilayah lainnya, sehingga mendorong terciptanya spesialisasi spesifik wilayah. Dengan demikian akan terjadi persaingan antar wilayah untuk menjadi pusat *spatial network* dari wilayah-wilayah lain secara nasional. Namun pendekatan ini mempunyai kelemahan yang antara lain apabila salah didalam mengelola *spatial network* tadi tidak mustahil menjadi awal dari proses disintegrasi. Untuk itu harus diterapkan konsep pareto pertumbuhan yang bisa mengendalikan keseimbangan pertumbuhan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Konsep pareto ini diharapkan

mampu memberikan keserasian pertumbuhan antar wilayah perkotaan dengan penerapan insentif-insentif kepada wilayah perkotaan yang kurang berkembang.

D. Definisi Perubahan Fungsi Lahan (*konversi lahan*)

Utomo dkk. (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazim disebut dengan konversi lahan sebagai perubahan penggunaan atau fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin banyak jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Irawan (2004) mengungkapkan bahwa konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding permintaan komoditas non pertanian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju lebih tinggi dibanding permintaan komoditas pertanian. Konsekuensi lebih lanjut adalah, karena kebutuhan lahan untuk memproduksi setiap komoditas merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan, maka pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk

kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibanding kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Pengertian konversi atau alih fungsi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Konversi lahan pertanian ini tidak terlepas dari situasi ekonomi secara keseluruhan. Di negara-negara yang sedang berkembang konversi lahan tersebut umumnya dirangsang oleh transformasi struktur ekonomi yang semula bertumpu pada sektor pertanian ke sektor ekonomi yang lebih bersifat industrial. Proses transformasi ekonomi tersebut selanjutnya merangsang terjadinya migrasi penduduk ke daerah-daerah pusat kegiatan bisnis sehingga lahan pertanian yang lokasinya mendekati pusat kegiatan bisnis dikonversi untuk pembangunan kompleks perumahan. Secara umum pergeseran atau transformasi struktur ekonomi merupakan ciri dari suatu daerah atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka konversi lahan pertanian dapat dikatakan sebagai suatu fenomena pembangunan yang pasti terjadi selama proses pembangunan masih berlangsung. Begitu pula selama jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dan tekanan penduduk terhadap lahan terus meningkat maka konversi lahan pertanian sangat sulit dihindari (Kustiawan, 1997).

Sihaloho (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan adalah alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non pertanian atau dari lahan non pertanian ke lahan pertanian. Dari hasil penelitiannya yang dilakukan di

Kelurahan Mulaharja, dia memaparkan bahwa konversi lahan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor pada arus makro yang meliputi pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk, intervensi pemerintah dan ‘marginalisasi’ ekonomi atau kemiskinan ekonomi dan faktor pada asas mikro yang meliputi pola nafkah rumah tangga (struktur ekonomi rumah tangga), kesejahteraan rumah tangga (orientasi nilai ekonomi rumah tangga) dan strategi bertahan hidup rumah tangga (tindakan ekonomi rumah tangga).

E. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan*

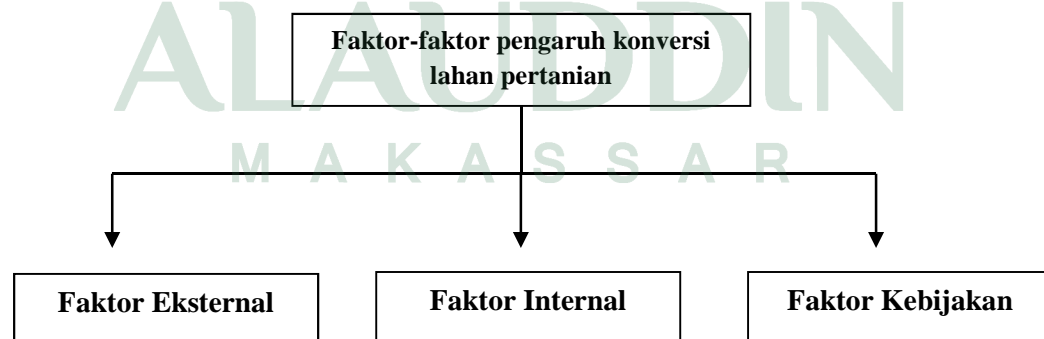
Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non-pertanian. Di tingkat wilayah, perubahan pemanfaatan lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah.

Pengaruh langsung dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung, seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta

peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan dipinggiran kota. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah.

Menurut Situmeang (1998) dijelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi dimana telah terjadi peningkatan peranan sektor non-pertanian terhadap perekonomian dapat mempercepat perubahan pola penggunaan lahan ke arah pengkotaan. Selanjutnya, perubahan struktur perekonomian sendiri dapat dijelaskan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dapat mempercepat terjadinya struktur ekonomi kearah sektor manufaktur, jasa dan sektor non-pertanian lainnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perubahan penggunaan lahan pertanian (sawah), yaitu (Kustiawan A, 1997);



Gambar 2.1. Bagan Faktor Pengaruh Konversi Lahan Pertanian

1. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi yang mendorong perubahan penggunaan lahan sawah ke penggunaan non-pertanian,
2. Faktor-faktor Internal adalah kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong lepasnya kepemilikan lahan,
3. Faktor Kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain (Isa I, 2004 : 4-6) :

1. Faktor kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (*sub urban area*). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi

sasaran pengembangan kegiatan non-pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat keberadaan “sawah kejeput” yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.

3. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.
4. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
5. Degradasi lingkungan, antara lain kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama

tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya instrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang berpotensi meracuni tanaman padi.

6. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan, Sihalo (2004) membagi konversi lahan ke dalam tujuh pola atau tipologi yaitu:

1. Konversi Gradual-Berpola Sporadis; pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama (lahan yang kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi).
2. Konversi Sistematis Berpola (*enclave*); pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk 'semparan lahan' secara serentak dalam waktu yang relatif sama.
3. Konversi Adaptasi Demografi (*Population growth driven land conversion*); pola konversi yang terjadi dikarenakan kebutuhan tempat tinggal atau pemukiman akibat pertumbuhan penduduk.

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (*Social Problem driven land conversion*); pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari masyarakat meninggalkan kondisi lama dan bahkan keluar dari sektor pertanian (utama).
5. Konversi Tanpa Beban; pola konversi yang dilakukan oleh pelaku (baik warga lokal) untuk melakukan aktivitas menjual lahan kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.
6. Konversi Adaptasi Agraris; pola konversi yang terjadi karena keinginan meningkatkan hasil pertanian dan juga minat untuk bertani di suatu tempat tertentu sehingga lahan dijual dan membeli lahan baru di tempat lain yang lebih bernilai produktif dan merupakan tempat yang 'dipandang tepat' untuk berusaha.
7. Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Pola; konversi yang diakibatkan oleh berbagai faktor khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, untuk perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak spesifik dijelaskan dalam konversi adaptasi demografi.

F. Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian ke Non-Pertanian

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian memiliki beberapa dampak dan pengaruh yang kuat bagi beberapa aspek. Dampak negatif akibat perubahan pemanfaatan lahan, antara lain (Widjanarko, 2006) :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.

2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005), bahwa dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.

Dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan adalah hilangnya peluang memproduksi hasil pertanian di lahan sawah yang terkonversi, yang besarnya berbanding lurus dengan luas lahannya. Jenis kerugian tersebut

mencakup pertanian dan nilainya, pendapatan usaha tani, dan kesempatan kerja pada usaha tani. Selain itu juga hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja pada kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung dari kaitan ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*) dari kegiatan usaha tani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi (Sumaryanto, 2001).

Menurut Firman (2005) dijelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural *lanskap*, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan perubahan penggunaan lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Menurut Ruswandi (2007) dijelaskan bahwa secara faktual perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Dalam beberapa hal, hiangnya pertanian memang sempat menjadi perdebatan yang cukup seru antara mereka yang pro terhadap hilangnya pertanian terutama lahan subur, beririgasi teknis. Mereka yang pro mempunyai

argument bahwa dapat diatasi dengan kemajuan teknologi atau ketersediaan lahan untuk pengembangan lahan pertanian baru sebagai substitusi lahan yang hilang. Kemajuan teknologi di bidang rekayasa pertanian menghasilkan produk yang lebih tinggi, lebih bertahan terhadap hama, sistem perakaran yang kuat dan waktu tumbuh yang singkat. Mereka yang kontra mempunyai pandangan lain, khususnya terkait ketersediaan lahan pertanian subur, produktif dan beririgasi teknis merupakan sumber daya yang sangat berharga. Hilangnya lahan pertanian yang terus menerus di semua WPU kota yang ada tanpa kendali di satu sisi dan makin bertambahnya kebutuhan perkotaan sebagai akibat penambahan penduduk namun pasti pada suatu saat yang akan datang akan mengakibatkan kesenjangan antar produksi dan konsumsi yang semakin lebar. Kemampuan berswasembada akan semakin jauh dari harapan. (Dr. Hadi Sabar Yunus, M.A. ; 2008)

G. Peraturan Tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

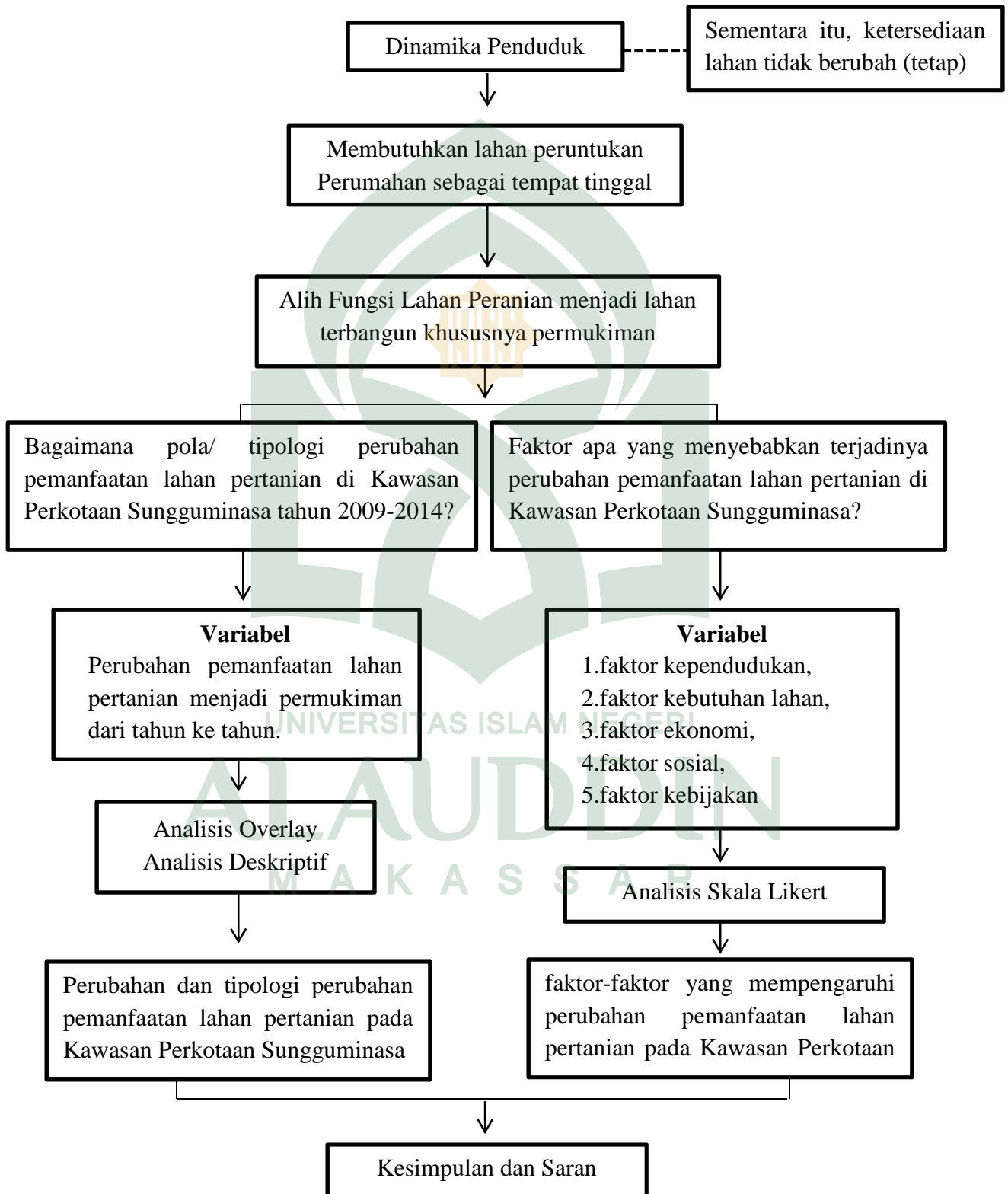
Dalam UUD tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Landasan Hukum dan Kebijakan perubahan penggunaan lahan pertanian selain UUPA, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa RTRW mempertimbangkan budidaya tanaman pangan dimana perubahan fungsi ruang kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya memerlukan kajian dan penilaian atas perubahan fungsi ruang tersebut secara lintas sektor, lintas daerah, dan terpusat.

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989). Penelitian ini menggunakan penelitian bentuk deskriptif korelasional. Penelitian deskriptif korelasional adalah bentuk penelitian untuk mempelajari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Data yang terkumpul melalui metode deskriptif kemudian diteliti keterhubungannya dengan menggunakan metode korelasional. (Rakhmat, 2005).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Data kuantitatif diperoleh melalui hasil kuesioner sebagai instrumen utama. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan. Informan tersebut didapatkan dari para responden yang hasil kuesionernya mendekati tujuan penelitian. Selain itu, informan yang akan diwawancara adalah pihak yang mengetahui kondisi lokasi penelitian, dalam hal ini misalnya aparat desa, tokoh masyarakat, atau bahkan warga setempat.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa selama dua bulan yaitu mulai bulan Juni sampai bulan Agustus 2015 dengan Judul **“Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa”**.

C. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni perubahan pemanfaatan lahan pertanian, pola perubahan pemanfaatan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data kuantitatif maupun data kualitatif yang dianggap relevan dengan penelitian. Untuk itu dua jenis data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif: Jenis data numerik atau berupa angka yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematik.
- b. Data Kualitatif: Jenis data yang berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis tetapi dengan kata-kata atau narasi. Data kualitatif tidak menggunakan model matematik,

hanya terbatas pada teknik pengolahan data seperti membaca grafik, tabel, dan gambar, yang kemudian dilakukan penafsiran atau analisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung ke lapangan atau kawasan penelitian seperti kondisi eksisting dari penggunaan lahan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan sebagai bentuk pembangunan fisik ruang tahun 2009 - 2014. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, Dinas Pekerjaan Umum bidang Tata Ruang Kabupaten Gowa, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, Kantor Kecamatan Somba Opu, Kantor Kecamatan Bontomarannu, dan Kantor Kecamatan Palangga, serta dinas - dinas terkait lainnya. Data sekunder berupa data kebijakan pembangunan wilayah, perubahan pemanfaatan lahan, harga lahan, kependudukan, foto udara, serta data - data lain yang dianggap mendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu :

1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi Langsung

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut (Nasir, 1998). Observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Metode ini akan digunakan untuk memperoleh data deskriptif yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan di lapangan.

b. Kuisisioner

Untuk penelitian yang bersifat kuantitatif kuisisioner juga dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan data. Hasil dari kuisisioner nantinya akan dinarasikan secara deskriptif. Kuisisioner ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian.

c. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian dari instansi terkait yaitu Dinas Pertanian. Dalam metode dokumentasi digunakan kajian pustaka dan kajian peta, kajian pustaka digunakan untuk mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian,

sedangkan kajian peta digunakan untuk mengkaji pengembangan fisik yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Survei Institusional

Survei institusional dilakukan dengan kunjungan untuk memperoleh data tertulis yang terdapat pada kantor/badan/instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Kantor Kecamatan, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya.

b. Studi Literatur

Survei literatur atau studi pustaka yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Kajian dapat dilakukan melalui buku - buku wilayah periurban, perubahan guna lahan, makalah, maupun jurnal ilmiah.

F. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Adapun yang menjadi populasi adalah masyarakat yang bermukim di wilayah delineasi Kawasan Perkotaan Sungguminasa yaitu semua Desa/Kelurahan dalam wilayah administrasi Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Borongloe yang

termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontomarannu serta Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Mangalli, Kelurahan Tetebatu, Kelurahan Parangbanoa, Desa Taeng, Desa Bontoala, dan Desa Je'netallasa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Palangga. Banyaknya populasi adalah sebanyak 228.216 Jiwa. (*Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Palangga, Kecamatan Bontomarannu Dalam Angka Tahun 2015*).

2. Sampel

Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi, yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri keberadaan populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel acak (*random sampling*). Dalam penarikan sampel, diupayakan sampel yang ditarik dapat merepresentasikan dari kondisi secara keseluruhan, walaupun jumlah sampel yang ditarik relative kecil dibandingkan populasi. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini maka digunakan rumus sebagai berikut (Jauhari H, 2010 : 22):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Toleransi derajat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang nilainya antara 2% - 15%.

Dalam hal ini jumlah populasi (n) sebanyak 228.216 jiwa, presisi derajat kelonggaran ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90% maka jumlah sampelnya yaitu :

$$n = \frac{228.216}{1 + 228.216 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{228.216}{1 + 2282,16}$$

$$n = \frac{228.216}{2283,16}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100 \text{ responden}$$

Jumlah responden disebar disetiap Desa/ kelurahan yang masuk dalam wilayah Kawasan Perkotaan Sungguminasa.

G. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1981). Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependen variable*) yaitu alih fungsi lahan pertanian dan variabel bebas (*indpenden variabel*) yang terdiri dari faktor

kependudukan, faktor kebutuhan lahan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor kebijakan.

Tabel 3.1
Faktor - Faktor, Variabel dan Indikator Penyebab
Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian

No	Faktor	Indikator
1	Faktor Kependudukan	Pertumbuhan penduduk
		Kepadatan penduduk
2	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan
		Lokasi lahan
3	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk
		Tingkat pendapatan penduduk
4	Faktor Sosial	Pengaruh tetangga
		Karakteristik Pemilik Lahan
5	Faktor Kebijakan	Perizinan Pemerintah

H. Definisi Operasional

1. Pemanfaatan lahan dapat dipahami sebagai suatu usaha penggunaan lahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berupa pemanfaatan lahan pertanian yang banyak terjadi perubahan sebagai akibat dari pembangunan fisik ruang.
2. Lahan pertanian merupakan lahan sawah yang memproduksi padi selama 3 bulan sekali.
3. Lahan bukan pertanian adalah lahan yang pemanfaatannya bukan termasuk lahan pertanian

4. Alih fungsi lahan pertanian adalah berubahnya aktivitas lahan pertanian ke aktivitas non pertanian yang disebabkan oleh pembangunan fisik, salah satunya. Perubahan pemanfaatan lahan pertanian pilihan bagi petani guna meningkatkan pendapatan dari tanah yang dimiliki sebagai respon tindakan atas beberapa faktor yang mempengaruhi. Perubahan terhadap pemanfaatan lahan dapat diukur dengan menjumlahkan frekuensi skor yang diperoleh dari hasil kuesioner masing – masing indikator instrumen yaitu persepsi petani terhadap perubahan ekonomi, perubahan taraf sosial, produktivitas lahan, dan dukungan pemerintah saat mengkonversi lahan tersebut.
5. Faktor kependudukan ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi skor dari beberapa indikator yang terkait dengan kondisi kependudukan responden seperti a) pertumbuhan penduduk, dan b) Kepadatan penduduk.
6. Faktor kebutuhan lahan, untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Faktor kebutuhan lahan ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi skor dari indikator a) Nilai lahan dan b) Lokasi lahan.
7. Faktor ekonomi. Karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya. Factor

ekonomi ditentukan dengan menjumlahkan skor dari indikator a) Mata pencaharian dan b) tingkat pendapatan.

8. Faktor sosial, ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi skor dari indikator a) pengaruh tetangga, dan b) karakteristik pemilik lahan.
9. Faktor kebijakan ditentukan dengan indikator yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan, yaitu aspek perizinan pemerintah dalam mendirikan bangunan.

I. Metode Analisis Data

1. Alat Analisis Untuk Rumusan Masalah Pertama

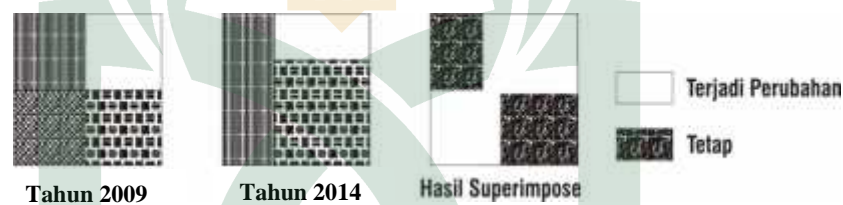
Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa menggunakan metode atau pendekatan meliputi :

a. Analisis *Super Impose (Overlay)*

Salah satu metode analisis keruangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang susun atau overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pemanfaatan lahan. Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta perubahan fungsi lahan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa.

Tumpang susun data keruangan atau overlay adalah salah satu

prosedur analisis data spasial, dimana pada proses ini layer dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. Proses overlay sendiri terdiri dari beberapa metode, yaitu *identity*, *intersect*, *union*, *update*, *erase*, dan *symmetrical difference*. Software yang digunakan dalam teknik penggambaran serta simulasi tugas akhir ini yaitu menggunakan software ArcGIS 10.3 untuk pengolahan data vector di combine dengan Global Mapper 9.0 untuk pengolahan data raster.



2. Alat Analisis Untuk Rumusan Masalah Kedua

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara sistematis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan ciri atau karakteristik variabel yang ditetapkan.

Untuk mendukung hal tersebut, maka penyebab perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.

b. Tabulasi Silang (*Cross Tabulation*)

Data yang terjaring melalui hasil kuisisioner, diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Cross Tabulation*).

Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu berpengaruh, kurang berpengaruh, dan tidak berpengaruh.

c. Metode Analisis Skala Lickert

Skala Lickert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti (Lickert R.,1932;1–55).

Menentukan interval dapat digunakan **rumus interval** :

$$I = 100 / \text{Jumlah Skor (likert)}$$

$$\text{Maka} = 100 / 3 = 33,33$$

$$\text{Hasil (I)} = 33,33$$

(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval :

- 1) Angka 0,00% – 33,33 % = Tidak Berpengaruh
- 2) Angka 33,34% – 66,66% = Kurang Berpengaruh
- 3) Angka 66,67% – 100% = Berpengaruh

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gowa

a. Batas Administrasi dan Letak Geografis

Kabupaten Gowa terletak di bagian Selatan dari provinsi Sulawesi Selatan, dimana ibukotanya adalah Kota Sungguminasa. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Gowa berada pada $12^{\circ}.33,19'$ - $13^{\circ}.15,17'$ Bujur Timur dan $50.5 - 50.34,7'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah $1.883,33 \text{ Km}^2$.

Wilayah Kabupaten Gowa terletak pada ketinggian 0 – 2800 m diatas permukaan laut, berada pada jarak $\pm 10 \text{ Km}$ dari Kota Makassar. Dari segi morfologis Kabupaten Gowa dibagi menjadi 3 wilayah yaitu : morfologi dataran rendah di bagian Barat, perbukitan di tengah dan pegunungan di bagian Timur–Selatan. Kabupaten Gowa beriklim cukup basah dan kering dengan curah hujan rata-rata 1.000 - 4.000 mm. Temperatur relatif tinggi sepanjang tahun, yaitu antara 220–260 pada daerah dataran rendah dan 180–210 pada daerah dataran tinggi.

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Manggala Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jenepono.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Gowa sebesar 1.883,33 Km² yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) Kecamatan dan 167 Desa/ Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta administrasi dan tabel 4.1.

PETA ADMINISTRASI



Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Gowa Dirinci Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Bontonompo	33.62	1.79	14
2	Bontonompo Selatan	26.01	1.38	9
3	Bajeng	79.13	4.20	14
4	Bajeng Barat	19.04	0.01	7
5	Pallangga	48.24	2.56	16
6	Barombong	20.67	1.10	7
7	Somba Opu	28.09	1.49	14
8	Bontomarannu	52.63	2.79	9
9	Pattallassang	84.96	4.51	8
10	Parangloe	221.26	11.75	7
11	Manuju	91.90	4.88	7
12	Tinggimoncong	275.63	14.64	7
13	Tombolo Pao	251.82	13.37	9
14	Parigi	132.76	7.05	5
15	Bungaya	175.53	9.32	7
16	Bontolempangan	142.46	7.56	8
17	Tompobulu	132.54	7.04	8
18	Biringbulu	218.84	11.62	11
Jumlah		1883.33	100	167

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2013

b. Topografi

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong,

Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi atau ketinggian tempat di Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai 2800 meter dari permukaan laut (mdpl).

c. Kemiringan Lereng

Kabupaten Gowa memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari daerah landai bergelombang dan sangat curam. Beberapa Wilayah Kecamatan dengan kategori sangat curam adalah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Secara umum, tingkat kemiringan lereng di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiringan lereng 0-8 %, sebesar 56.856,08 ha
- 2) Kemiringan lereng 8-15 %, sebesar 37.680,61 ha
- 3) Kemiringan lereng 15-25 %, sebesar 47.175,16 ha
- 4) Kemiringan lereng 25-40 %, sebesar 29.418,98 ha
- 5) Kemiringan lereng >40 %, sebesar 8.849,87 ha

d. Geologi

Struktur geologi batuan Kabupaten Gowa yang memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Gowa pada umumnya antara lain:

- 1) Batuan epiklastik gunungapi (batu pasir andesitan, batu lanau, konglomerat dan breksi
- 2) Batu gamping kelabu hingga putih berupa lensa-lensa besar
- 3) Batu gamping terumbu.
- 4) Batu pasir hijau, grewake, napal, batu lempung dan tuf, sisipan lava bersisipan andesit-basal
- 5) Batu pasir, konglomerat, tufa, batulanau, batulempung, batu gamping, napal
- 6) Batu sabak, kuarsit, filit, batu pasir kuarsa malih, batu lanau malih dan pualam, setempat batu lempung malih
- 7) Granit, granodiorit, riolit, diorit, dan aplit
- 8) Hasil erupsi parasite
- 9) Konglomerat, sedikit batupasir glokonit dan serpih
- 10) Lava andesit dan basal, dan latit kuarsa
- 11) Lava, breksi, tufa, konglomerat
- 12) Napal diselingi batulanau gampingan dan batupasir gampingan
- 13) Napal, kalkarenit, batugamping koral bersisipan dengan tuf dan batupasir, setempat dengan konglomerat
- 14) Serpih coklat kemerahan, sepi napalan kelabu, batugamping, batupasir kuarsa, konglomerat, batugamping dan setempat batubara

TOPOGRAFI



KEMIRINGAN LERENG



GEOLOGI



e. Jenis Tanah

Jenis tanah di kabupaten Gowa diklasifikasikan dalam: 4 (empat) tipe:

- 1) Alluvial Muda merupakan endapan aluvium (endapan aluvial sungai, pantai dan rawa) yang berumur kuartar (resen) dan menempati daerah morfologi pedataran dengan ketinggian 0-60 m dengan sudut kemiringan lereng $<3\%$. Tekstur beraneka mulai dari ukuran lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, dengan tingkat kesuburan yang tinggi.
- 2) Regosol adalah tanah hasil lapukan dari batuan gunungapi dan menempati daerah perbukitan vulkanik, dengan ketinggian 110-1.540 m dengan sudut kemiringan lereng $>15\%$. Sifat-sifat fisiknya berwarna coklat hingga kemerahan, berukuran lempung lanauan – pasir lempungan, plastisitas sedang, agak padu, tebal 0,1-2,0 m.
- 3) Litosol merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan ketinggian 3-1.150 m dan sudut lereng $< 70\%$. Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan, hingga pasir lempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m.

- 4) Mediteran merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batugamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan ketinggian 8-750 m dan sudut lereng $> 70\%$. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasir, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m.

f. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Gowa umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Saddang dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang yang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan merupakan satu daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang berada di Kabupaten Gowa merupakan sumber air bersih dan pertanian di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Daerah aliran sungai (DAS) lain adalah Je'netallasa, Pa'bundukang, Malino, Cadika, Pallappakang. Anak sungai-sungai ini berlanjut ke sungai yang akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia ataupun selat Makassar. Kondisi hidrologi Kabupaten Gowa secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
- 2) Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Gowa selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya. Potensi sumberdaya air di wilayah Kabupaten Gowa yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

1) Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Gowa. Berdasarkan pada kajian potensi sumberdaya air maka daerah Kabupaten Gowa terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing terdiri dari DAS Je'neberang, je'netalasa, Pa'bundukang, Malino, Candika dan Pallappakang. Di luar dari enam DAS ini terdapat juga beberapa DAS kecil lainnya yang umumnya hampir terdapat di seluruh wilayah pegunungan di pinggiran kawasan pantai. Air dari beberapa DAS kecil ini yang terletak di bagian Timur wilayah studi bermuara di laut Makassar.

2) Sumberdaya Air Buatan

Sumberdaya air buatan di Kabupaten Gowa dimanfaatkan dengan membuat bendungan air yang antara lain berupa pembuatan 1 buah bendungan yaitu bendungan Bili-Bili yang tercakup dalam wilayah kecamatan Bontomarannu. setelah itu dibangun pula beberapa bendungan/waduk Kecil sebagai aliran irigasi yang tersebar di beberapa kecamatan di area wilayah Kabupaten Gowa.

3) Daerah Resapan Air

Daerah resapan air yang ada di Wilayah Kabupaten Gowa terdapat pada beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Parangloe, Sombaopu, Pallangga, Patallassang dan Bontomarannu.

Daerah-daerah tersebut merupakan dataran rendah sehingga potensi resapan air pada wilayah tersebut cukup besar.

4) Rawa dan Daerah Banjir

Wilayah Kabupaten Gowa yang terdiri dari wilayah dataran tinggi dan dataran rendah serta daerah pesisir memiliki daerah-daerah rawa dan daerah rawan banjir. Pada umumnya daerah tersebut berada pada wilayah kecamatan yang berada di dataran rendah, seperti Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Pallangga, Barombong, Sombaopu, Bontomarannu, Patallassang dan Parangloe.

g. **Klimatologi**

Wilayah Indonesia pada umumnya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut terjadi musim hujan.

1) Iklim, Suhu Udara dan Curah Hujan

Kabupaten Gowa dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun

setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Berdasarkan data curah hujan tertinggi yang di pantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan seperti stasiun Geofisika Gowa dan BPP Limbung terjadi pada bulan Januari yang mencapai rata-rata 470 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya Kabupaten Gowa mempunyai iklim tropis basah. Curah hujan dan hari hujan menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500 - 1.000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1.000 - 2.000 mm/tahun.

Suhu Udara rata-rata tahunan di dataran rendah berkisar antara 25,50 C - 27,90 C, angka ini berkurang 0,60 C setiap kenaikan 100 meter.

Curah Hujan dan hari hujan akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (ground water) dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk prasarana pengairan menggunakan sistem pompa air dalam.

2) Kelembaban

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban udara di Kabupaten Gowa relatif bervariasi antara 78,8% sampai 85% tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam/hari. Kelembaban udara berkisar antara 15 sampai 108 mmhg, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah hari hujan sebanyak 6 hari.

3) Kecepatan dan Arah Angin

Kecepatan angin berkisar antara 41,9 - 72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca di Kabupaten Gowa cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan. Kabupaten Gowa seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

JENIS TANAH



HIDROLOGI



KLIMATOLOGI



Tabel 4.2
Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gowa Setiap Bulan

No.	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	361	22
2	Februari	639	24
3	Maret	176	23
4	April	136	20
5	Mei	94	12
6	Juni	131	18
7	Juli	3	5
8	Agustus	39	6
9	September	1	3
10	Oktober	57	12
11	Nopember	174	23
12	Desember	676	31
Jumlah		2487	199

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2013

2. Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Sungguminasa

a. Letak Geografis Wilayah

Secara umum luas wilayah Kota Sungguminasa kurang lebih 5.583 Ha dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Borongloe yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontomarannu serta Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Mangalli, Kelurahan Tetebatu, Kelurahan Parangbanoa, Desa Taeng, Desa Bontoala, dan Desa Je'netallasa yang termasuk dalam wilayah

administrasi Kecamatan Palangga. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel

4.3.

Tabel 4.3

Luas Kota Sungguminasa Berdasarkan Administrasi Wilayah Pemerintahan

No	Kawasan Perkotaan Sungguminasa	Luas (Ha)	%
Kecamatan Somba Opu			
1	Kelurahan Pandang-Pandang	216	4.69
2	Kelurahan Sungguminasa	146	3.17
3	Kelurahan Tompobalang	180	3.91
4	Kelurahan Batangkaluku	130	2.83
5	Kelurahan Tamarunang	216	4.69
6	Kelurahan Bontoramba	212	4.61
7	Kelurahan Mawang	299	6.50
8	Kelurahan Romang Polong	271	5.89
9	Kelurahan Bonto-Bontoa	161	3.50
10	Kelurahan Kalegowa	121	2.63
11	Kelurahan Katangka	136	2.96
12	Kelurahan Tombolo	206	4.48
13	Kelurahan Pacinongan	371	8.06
14	Kelurahan Samata	144	3.13
Jumlah		2.809	61.05
Kecamatan Bontomarannu			
1	Kelurahan Borongloe	313	6.80
Kecamatan Pallangga			
1	Kelurahan Pangkabinanga	189	4.11
2	Kelurahan Mangalli	150	3.26
3	Kelurahan Tetebatu	251	5.46
4	Kelurahan Parangbanoa	215	4.67
5	Desa Taeng	227	4.93
6	Desa Bontoala	125	2.72
7	Desa Je'netallasa	322	7.00
Jumlah		1.479	32.15
Luas Keseluruhan		4.601	100

Sumber : Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu & Pallangga Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan posisi dan letak geografis wilayah, Kota Sungguminasa berada pada koordinat 505-5034.7' LS dan 12033.19'–13015.17' BT. Kota Sungguminasa merupakan wilayah PKN dalam konteks Mamminasata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Konteks RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas administrasi wilayah berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan dan Kabupaten Takalar.
- Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattallassang
- Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Barombong, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

b. Keadaan Topografi

Keadaan topografi Kota Sungguminasa berada pada ketinggian 0-500 M dari permukaan air laut, dengan kemiringan berada pada kisaran 0-8%. Selanjutnya berdasarkan kondisi tersebut, keadaan iklim Kota Sungguminasa termasuk kategori iklim tropis, temperatur rata-rata harian berkisar antara 200C - 300C.

DELINEASI KAWASAN



TOPOGRAFI KAWASAN



c. Keadaan Geologi

Keadaan geologi Kota Sungguminasa berdasarkan data yang diperoleh, terdiri atas; relief kasar yang merupakan morfologi perbukitan, morfologi pegunungan, sungai, daratan dan pantai. Satuan batuan yang membentuk morfologi tersebut adalah batuan epiklastik gunung api (batu pasir andesitan, batu lanau, konglomerat, dan breksi) serta lava, dan tufa. Morfologi yang dominan adalah daratan, dan perairan dengan kelerengan yang sangat bervariasi, diduga akibat adanya proses erosi, tanah longsor, dan gerakan massa tanah lain yang sangat efektif.

d. Keadaan Hidrologi

Keadaan hidrologi Kota Sungguminasa, berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan ditemukan daerah-daerah di kawasan kota yang mengalami genangan periodik. Sumber air permukaan berasal dari Sungai Je'neberang.

Pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan air permukaan mempengaruhi sebahagian wilayah Kota Sungguminasa, khususnya di wilayah Kecamatan Somba Opu dan menerima air limpasan dari Sungai Je'neberang yang merupakan ancaman banjir perkotaan, melalui kanal-kanal yang bermuara ke Sungai Je'neberang.

GEOLOGI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HIDROLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

e. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kota Sungguminasa antara lain jenis tanah alluvial muda, penyebarannya disepanjang Sungai Je'neberang, membujur dari Kecamatan Bontomarannu, Pallangga, dan Somba Opu. Jenis tanah tersebut meliputi jenis tanah dengan aneka tekstur mulai dari lempung, lanau, pasir, lumpur, kerikil, hingga kerakal, digolongkan kedalam jenis tanah produktif dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 0-60 m, secara umum berlokasi di daerah pinggiran Kota Sungguminasa dan dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian.

f. Tata Guna Lahan

Kondisi tata guna lahan di Kota Sungguminasa secara umum terdiri atas peruntukan lahan permukiman dengan fasilitas penunjang didalamnya diantaranya perkantoran, pendidikan, peribadatan serta perdagangan jasa, lahan pertanian, dan tegalan/ kebun. Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kota Sunggumana secara umum sudah mengalami perubahan yang cukup drastis, akibat terjadinya peningkatan pembangunan terutama pengembangan untuk perumahan.

JENIS TANAH



Tabel 4.4

Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Permukiman	2124	46.16
2.	Tegalan/ Kebun	723	15.71
3.	Persawahan teknis	1630	35.43
4.	Sawah Tadah Hujan	124	2.70
Jumlah		5.583	100,00

*Sumber: Aplikasi GIS***g. Kependudukan**

Keadaan demografi dan kependudukan hingga akhir tahun 2008 di Kota Sungguminasa menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Badan Pusat Statistik menunjukkan Kota Sungguminasa saat ini dihuni penduduk kurang lebih 228.216 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang. Secara umum kondisi demografi dan kependudukan Kota Sungguminasa dijelaskan pada kajian berikut.

1) Pertumbuhan, Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat pertumbuhan penduduk Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa selama lima tahun terakhir dirinci berdasarkan Kelurahan/ Desa memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di

Kota Sungguminasa berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 4.5.

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pandang-Pandang	7.278	7.302	7423	7654	8.429
2	Sungguminasa	7263	7321	7443	7674	8.450
3	Tompobalang	10379	10487	10661	10992	12.106
4	Batangkaluku	13061	13207	13426	13843	15.245
5	Tamarunang	12952	13150	13369	13785	15.183
6	Bontoramba	3457	3492	3550	3660	4.031
7	Mawang	4073	4104	4172	4302	4.738
8	Romang Polong	6542	6611	6721	6930	7.632
9	Bonto-Bontoa	12053	12221	12424	12810	14.108
10	Kalegowa	2395	2418	2458	2534	2.790
11	Katangka	9339	9512	9670	9971	10.981
12	Tombolo	14475	14475	14608	15313	16.864
13	Pacinongan	19878	19878	20434	21069	23.204
14	Samata	4687	6981	7182	7405	8.155
15	Borongloe	3.950	3.966	4.052	4.180	4.278
16	Pangkabinanga	5485	5.504	5.595	5.769	6.260
17	Mangalli	9353	9.491	9.649	9.949	10.796
18	Tetebatu	5543	5.667	5.843	6.340	6.340
19	Parangbanoa	2432	2.622	2.704	2.934	2.934
20	Taeng	6771	6.879	6.993	7.210	7.824
21	Bontoala	17.664	17.839	18.135	18.699	20.290
22	Je'netallasa	15.122	15.454	15.711	16.200	17.578
Jumlah		194.152	198.581	202.223	209.223	228.216

Sumber : Kec. Somba Opu, Kec. Bontomarannu dan Kec. Palangga Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 4.6

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah(Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Pandang-Pandang	8.429	2,16	3.902
2	Sungguminasa	8.450	1,46	5.788
3	Tompobalang	12.106	1,80	6.726
4	Batangkaluku	15.245	1,30	11.727
5	Tamarunang	15.183	2,16	7.029
6	Bontoramba	4.031	2,12	1.901
7	Mawang	4.738	2,99	1.585
8	Romang Polong	7.632	2,71	2.816
9	Bonto-Bontoa	14.108	1,61	8.763
10	Kalegowa	2.790	1,21	2.306
11	Katangka	10.981	1,36	8.074
12	Tombolo	16.864	2,06	8.186
13	Pacinongan	23.204	3,71	6.254
14	Samata	8.155	1,44	5.663
15	Borongloe	4.278	3,13	1.367
16	Pangkabinanga	6.260	1,89	3.312
17	Mangalli	10.796	1,50	7.197
18	Tetebatu	6.340	2,51	2.526
19	Parangbanoa	2.934	2,15	1.365
20	Taeng	7.824	2,27	3.447
21	Bontoala	20.290	1,25	16.232
22	Je'netallasa	17.578	3,22	5.459
Jumlah		228.216	46.01	121.625

Sumber: Kec. Somba Opu, Kec. Bontomarannu dan Kec. Palangga Dalam Angka Tahun 2015

2) Adat Istiadat dan Kebiasaan Penduduk

Adat istiadat merupakan karakteristik masyarakat suatu daerah yang dijunjung tinggi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang turut menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan. Kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini di Kota sungguminasa antara lain:

- Ñ Rasa persaudaraan dan gotong royong masyarakat masih cukup kuat, dan
- Ñ Upacara adat, antara lain; perkawinan, khitanan, kematian, syukuran kelahiran bayi dan pesta adat lainnya.

B. *Perubahan Pemanfaatan Lahan*

1. **Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Tahun 2009, 2012 dan 2014.**

Variabel ini akan diukur menggunakan sistem superimpose peta eksisting penggunaan lahan tahun 2009, 2012 dan 2014 guna melihat perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi permukiman dan perhitungan presentase luas perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Berdasarkan hasil teknik superimpose untuk Kawasan Perkotaan Sungguminasa telah terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian dari

tahun 2009-2012 sebesar 176,93 Ha. Sementara perubahan fungsi lahan pertanian dari tahun 2012-2014 sebesar 68,70 Ha. Sehingga perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dari tahun 2012-2014 adalah sebesar 245.63 Ha. Dapat dilihat luasan perubahan fungsi lahan pertanian pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Luasan Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Lahan permukiman
Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014

No	Pemanfaatan	Tahun 2009		Tahun 2012		Tahun 2014		Perubahan
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)
1	Lahan Pertanian	1.999,67	48	1.822,74	47	1.754,04	45	245,63
2	Lahan Permukiman	1.878,61	52	2.055,54	53	2.124,24	55	245,63
Jumlah		3.878,28	100	3.878,28	100	3.878,28	100	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisis superimpose (overlay) peta eksisting penggunaan lahan tahun 2009, 2012 dan 2014 di Kawasan Perkotaan Sungguminasa, diperoleh hasil evaluasi perubahan pemanfaatan lahan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Lahan Pertanian

Untuk penggunaan lahan pertanian dari hasil analisis menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan luasan lahan pertanian, dimana pada tahun 2009 luas lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa sebesar 1.999,67 Ha sedangkan pada tahun 2012 luas lahan pertanian sebesar 1.822,74 Ha artinya pemanfaatan lahan

pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa mengalami penurunan sebesar 176,93 Ha. Selanjutnya pada tahun 2012-2014, luas lahan pertanian sebesar 1.822,74 Ha tersisa menjadi 1.754,04 Ha atau terjadi perubahan seluas 68,70 Ha. Sehingga luas lahan pertanian yang mengalami perubahan dari tahun 2012-2014 pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa sebesar 245,63 Ha.

2) Pemanfaatan Lahan Permukiman

Untuk penggunaan lahan eksisting permukiman, dari hasil analisis diketahui bahwa telah terjadi perubahan luasan permukiman dimana pada tahun 2009 luas lahan permukiman di Kawasan Perkotaan sungguminasa sebesar 1.878,61 Ha sedangkan pada tahun 2012 penggunaan lahan permukiman menjadi 2.055,54 Ha atau terjadi perubahan sebesar 176,93 Ha. Pada rentan tahun 2012-2014, peruntukan lahan permukiman bertambah luasannya menjadi 2.124,24, artinya luasan lahan permukiman bertambah sebesar 68,70 Ha. Sehingga luasan peruntukan lahan permukiman dari tahun 2012 terjadi penambahan sebesar 245,63 Ha pada tahun 2014.

Sementara perubahan pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan data dari instansi terkait dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9.

Tabel 4.8

Luasan Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian
Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	
		2009	2014
1	Somba Opu	1.987	1.180
2	Pallangga	1.961	1.915
3	Bontomarannu	1.194	1.278
Jumlah		5.142	4.373

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gowa

Tabel 4.9

Luasan Perubahan Pemanfaatan Rumah/Bangunan
Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa Tahun 2009-2014

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	
		2009	2014
1	Somba Opu	807	1.262
2	Pallangga	537	960
3	Bontomarannu	1.105	1.465
Jumlah		2.449	3.687

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa

Untuk melihat kondisi perubahan fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun khususnya permukiman pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa dapat dilihat pada gambar petaberikut.

2009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2009 - 2012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2012 - 2014



2. Pola Atau Tipologi Perubahan Pemanfaatan Lahan

Berdasarkan kondisi gambar perubahan fungsi lahan pertanian, menunjukkan perubahan lahan menjadi kawasan permukiman terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terus bertambah setiap tahunnya pula sehingga dibutuhkan kawasan permukiman sebagai tempat tinggal. Adapun pola perubahan fungsi lahan yang terjadi pada kawasan perkotaan sungguminasa adalah pola Konversi Adaptasi Demografi (*Population growth driven land conversion*), yaitu pola konversi yang terjadi dikarenakan kebutuhan tempat tinggal atau pemukiman akibat pertumbuhan penduduk.

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Faktor	Indikator
1	Faktor Kependudukan	Pertumbuhan penduduk
		Kepadatan penduduk
2	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan
		Lokasi lahan
3	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk
		Tingkat pendapatan penduduk
4	Faktor Sosial	Tingkat pendidikan
		Karakteristik Pemilik Lahan
5	Faktor Kebijakan	Perizinan Pemerintah

a. Faktor Kependudukan

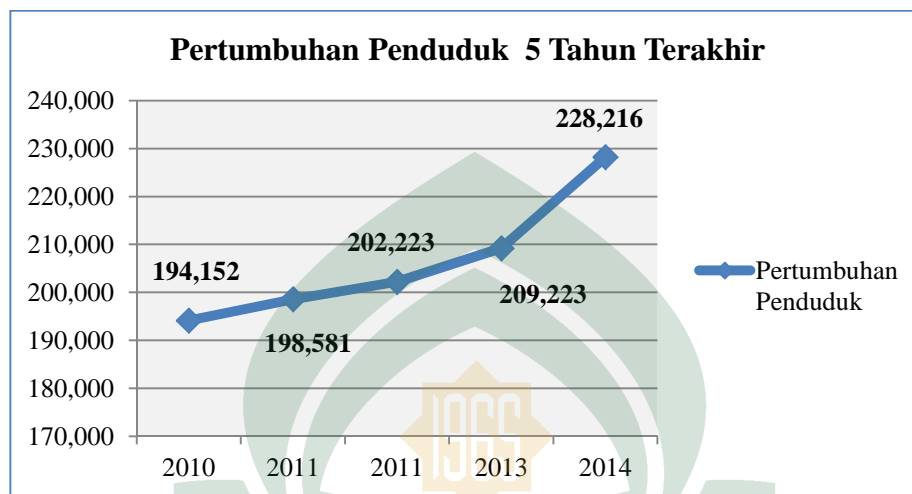
1) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terbilang cukup pesat, dapat dilihat pada tabel 4.11 perkembangan jumlah penduduk 5 tahun terakhir.

Tabel 4.11
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pandang-Pandang	7.278	7.302	7423	7654	8.429
2	Sungguminasa	7263	7321	7443	7674	8.450
3	Tompobalang	10379	10487	10661	10992	12.106
4	Batangkaluku	13061	13207	13426	13843	15.245
5	Tamarunang	12952	13150	13369	13785	15.183
6	Bontoramba	3457	3492	3550	3660	4.031
7	Mawang	4073	4104	4172	4302	4.738
8	Romang Polong	6542	6611	6721	6930	7.632
9	Bonto-Bontoa	12053	12221	12424	12810	14.108
10	Kalegowa	2395	2418	2458	2534	2.790
11	Katangka	9339	9512	9670	9971	10.981
12	Tombolo	14475	14475	14608	15313	16.864
13	Pacinongan	19878	19878	20434	21069	23.204
14	Samata	4687	6981	7182	7405	8.155
15	Borongloe	3.950	3.966	4.052	4.180	4.278
16	Pangkabinanga	5485	5.504	5.595	5.769	6.260
17	Mangalli	9353	9.491	9.649	9.949	10.796
18	Tetebatu	5543	5.667	5.843	6.340	6.340
19	Parangbanoa	2432	2.622	2.704	2.934	2.934
20	Taeng	6771	6.879	6.993	7.210	7.824
21	Bontoala	17.664	17.839	18.135	18.699	20.290
22	Je'netallasa	15.122	15.454	15.711	16.200	17.578
Jumlah		194.152	198.581	202.223	209.223	228.216

Sumber : Kec. Somba Opu, Kec. Bontomarannu dan Kec. Palangga Dalam Angka Tahun 2015



Gambar 4.16. Grafik Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Terakhir di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

Berdasarkan tabel 4.11 dan gambar 4.16, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang signifikan terjadi pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa, dimana jumlah penduduk banyak bertambah pada rentang tahun 2013-2014, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun ini, membutuhkan lebih banyak lahan terutama peruntukan kawasan permukiman.

M A K A S S A R

2) Kepadatan Penduduk

Tabel 4.12

Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perkotaan Sungguminasa

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah(Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Pandang-Pandang	8.429	2,16	3.902
2	Sungguminasa	8.450	1,46	5.788
3	Tompobalang	12.106	1,80	6.726
4	Batangkaluku	15.245	1,30	11.727
5	Tamarunang	15.183	2,16	7.029
6	Bontoramba	4.031	2,12	1.901
7	Mawang	4.738	2,99	1.585
8	Romang Polong	7.632	2,71	2.816
9	Bonto-Bontoa	14.108	1,61	8.763
10	Kalegowa	2.790	1,21	2.306
11	Katangka	10.981	1,36	8.074
12	Tombolo	16.864	2,06	8.186
13	Pacinongan	23.204	3,71	6.254
14	Samata	8.155	1,44	5.663
15	Borongloe	4.278	3,13	1.367
16	Pangkabinanga	6.260	1,89	3.312
17	Mangalli	10.796	1,50	7.197
18	Tetebatu	6.340	2,51	2.526
19	Parangbanoa	2.934	2,15	1.365
20	Taeng	7.824	2,27	3.447
21	Bontoala	20.290	1,25	16.232
22	Je'netallasa	17.578	3,22	5.459
Jumlah		228.216	46.01	121.625

Sumber: Kec. Somba Opu, Kec. Bontomarannu dan Kec. Palangga Dalam Angka Tahun 2015

b. Faktor Kebutuhan Lahan

1) Nilai Jual Lahan

Nilai jual lahan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa

berkisar antara Rp.500.000 sampai > Rp.5.000.0000 per meternya dan

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai jual lahan yang semakin tinggi mendorong penduduk yang memiliki lahan pertanian khususnya sawah cenderung menjual lahan mereka.

Tabel 4.13

Penilaian Responden Tentang Nilai Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Harga lahan		
		Rp. 500.000 - Rp 2.000.000	Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000	> Rp. 5.000.000
1	Pandang - Pandang	0	0	5
2	Sungguminasa	0	2	6
3	Tompobalang	0	1	3
4	Batangkaluku	0	2	3
5	Tamarunang	1	1	2
6	Bontoramba	1	1	2
7	Mawang	1	2	1
8	Romang Polong	0	1	5
9	Bonto – Bontoa	0	2	2
10	kalegowa	0	1	3
11	Katangka	0	0	5
12	Tombolo	0	1	3
13	Paccinongan	0	0	5
14	Samata	0	0	6
15	Borongloe	0	2	4
16	Pangkabinanga	3	1	0
17	Mangalli	2	1	0
18	Tetebatu	3	0	0
19	Parangbanoa	3	1	0
20	Taeng	4	0	0
21	Bontoala	2	1	0
22	Je'netallasa	2	2	1
Jumlah		22	22	56

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden tentang nilai lahan, dapat diketahui masyarakat yang menyatakan harga lahan Rp.500.000

– Rp.2.000.000/m² sebanyak 22 orang, yang menyatakan harga Rp.2.000.000 – Rp.5.000.000/m² sebanyak 22 orang, dan 56 orang yang menyatakan harga lahan > Rp.5.000.000/m². Masyarakat menyatakan, harga lahan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terus meningkat setiap tahunnya, selain ini adapula yang mematok harga sendiri sesuai kondisi dan letak lahannya. Adapun perhitungan skor akhir indikator nilai jual lahan, dapat dilihat pada tabel 4.14:

Tabel 4.14

Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 22	22
KB	3 * 22	66
B	5 * 56	280
Jumlah Skor		368
		368 / 500 = 0.736 = 74 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

2) Lokasi Lahan

Lokasi lahan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah, semakin strategis lokasi lahan tersebut maka semakin berpotensi akan terjadinya perubahan fungsi. Lokasi lahan Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa sangat strategis, selain karena berbatasan dengan Kota

Makassar (Ibukota Provinsi), pada Perkotaan Sungguminasa juga terdapat beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Tabel 4.15

Penilaian Responden Tentang Lokasi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Lokasi Lahan		
		Tidak Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Berpengaruh
1	Pandang - Pandang	0	0	5
2	Sungguminasa	0	1	7
3	Tompobalang	0	1	3
4	Batangkaluku	0	1	4
5	Tamarunang	1	2	1
6	Bontoramba	2	1	1
7	Mawang	0	2	2
8	Romang Polong	0	1	5
9	Bonto – Bontoa	0	2	2
10	kalegowa	0	1	3
11	Katangka	0	0	5
12	Tombolo	0	1	3
13	Paccinongan	0	2	3
14	Samata	0	1	5
15	Borongloe	0	2	4
16	Pangkabinanga	1	2	1
17	Mangalli	1	2	0
18	Tetebatu	1	1	1
19	Parangbanoa	1	2	1
20	Taeng	2	2	0
21	Bontoala	1	2	0
22	Je'netallasa	1	3	1
Jumlah		11	32	57

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden tentang lokasi lahan, yang menyatakan ada pengaruh sebanyak 11 orang, 32 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 57 orang menyatakan bahwa perubahan fungsi lahan dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut,

semakin strategis lokasinya, maka semakin berpotensi pula lahan tersebut untuk terjadi perubahan fungsi. Adapun perhitungan skor akhir indikator lokasi lahan, dapat dilihat pada tabel 4.16:

Tabel 4.16
Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 11	11
KB	3 * 32	96
B	5 * 57	285
Jumlah Skor		392
		$392 / 500 = 0.784$ = 78 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

c. Faktor Ekonomi

1) Mata Pencaharian

Mata Pencaharian merupakan salah satu faktor ekonomi yang juga berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Adapun mata pencaharian penduduk pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terdiri dari petani, pegawai/ PNS, wiraswasta dan pedagang, dan didominasi penduduk dengan profesi sebagai pegawai/ PNS.

Tabel 4.17

Penilaian Responden Tentang Mata Pencapaian Terhadap Perubahan
Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Mata Pencapaian		
		Petani	Pegawai/ PNS	Wiraswasta/ Pedagang
1	Pandang - Pandang	0	3	2
2	Sungguminasa	0	7	1
3	Tompobalang	1	2	1
4	Batangkaluku	1	2	2
5	Tamarunang	1	3	0
6	Bontoramba	2	1	1
7	Mawang	1	2	1
8	Romang Polong	2	2	2
9	Bonto – Bontoa	0	2	2
10	kalegowa	1	1	2
11	Katangka	0	3	2
12	Tombolo	1	2	1
13	Paccinongan	2	2	1
14	Samata	3	1	2
15	Borongloe	2	3	1
16	Pangkabinanga	1	2	1
17	Mangalli	2	0	1
18	Tetebatu	1	1	1
19	Parangbanoa	0	3	1
20	Taeng	1	2	1
21	Bontoala	0	1	2
22	Je'netallasa	1	2	2
Jumlah		23	47	30

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden, mata pencapaian masyarakat pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terdiri dari 23 orang bekerja sebagai petani, mereka yang bekerja sebagai petani juga mengandalkan mata pencahariannya pada profesi lain seperti menjadi buruh bangunan dan tukang ojek. Hal tersebut dikarenakan profesi

petani bersifat musiman. Sementara masyarakat yang berprofesi sebagai seorang pegawai/ PNS sebanyak 47 orang, dan 30 orang bermata pencaharian sebagai pedagang/ wiraswasta. Adapun perhitungan skor akhir indikator mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel 4.18:

Tabel 4.18
Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 23	23
KB	3 * 47	141
B	5 * 30	150
Jumlah Skor		314
		$314 / 500 = 0.628$ = 63 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

2) Tingkat Pendapatan

Berdasarkan hasil survei dan kuisisioner, tingkat pendapatan masyarakat pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa cenderung lebih besar dari Rp.1.000.000, sedangkan sebagian penduduknya masih ada yang memiliki pendapatan dibawah Rp.1.000.000. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa jenis pekerjaan menentukan pendapatan seseorang.

Tabel 4.19
Penilaian Responden Tentang Tingkat Pendapatan Terhadap
Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Tingkat Pendapatan		
		< Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	> Rp. 2.000.000
1	Pandang - Pandang	0	2	3
2	Sungguminasa	0	2	6
3	Tompobalang	1	1	2
4	Batangkaluku	1	2	2
5	Tamarunang	1	0	3
6	Bontoramba	1	2	1
7	Mawang	1	1	2
8	Romang Polong	2	1	3
9	Bonto – Bontoa	0	2	2
10	kalegowa	1	2	1
11	Katangka	0	2	3
12	Tombolo	1	1	2
13	Paccinongan	2	1	2
14	Samata	2	3	1
15	Borongloe	2	1	3
16	Pangkabinanga	1	1	2
17	Mangalli	1	2	0
18	Tetebatu	1	2	0
19	Parangbanoa	0	1	3
20	Taeng	1	2	1
21	Bontoala	0	2	1
22	Je'netallasa	1	1	3
Jumlah		20	34	46

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden tentang tingkat pendapatan, 20 orang menyatakan mereka berpendapatan < Rp. 1.000.000 setiap bulannya, mereka umumnya adalah yang berprofesi sebagai petani dan ada juga pedagang. Sementara yang memiliki pendapatan Rp.1.000.000 – Rp.2.000.0000 sebanyak 34 orang, 46

orang berpendapatan > Rp.2.000.000, mereka umumnya adalah yang berprofesi sebagai pedagang/ wiraswasta dan Pegawai/ PNS. Adapun perhitungan skor akhir indikator tingkat pendapatan, dapat dilihat pada tabel 4.20:

Tabel 4.20
Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 20	20
KB	3 * 34	102
B	5 * 46	230
Jumlah Skor		368
		$230 / 500 = 0.704$ $= 70 \%$

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

d. Faktor Sosial

1) Pengaruh Tetangga

Fenomena perubahan fungsi lahan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Sangat dimungkinkan bahwa, pesatnya perkembangan perubahan fungsi lahan disebabkan karena pengaruh tetangga yang telah mengkonversikan lahan mereka. Melihat jumlah orang yang mengkonversikan lahannya semakin banyak, tidak menutup kemungkinan, yang lain akan ikut mengkonversi atau menjual juga lahan yang dimilikinya.

Tabel 4.21
Penilaian Responden Tentang Pengaruh Tetangga Terhadap
Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Pengaruh Tetangga		
		Tidak Ada Pengaruh	Kurang Berpengaruh	Ada Pengaruh
1	Pandang - Pandang	1	3	1
2	Sungguminasa	2	4	2
3	Tompobalang	2	1	1
4	Batangkaluku	1	2	2
5	Tamarunang	2	2	0
6	Bontoramba	1	2	1
7	Mawang	2	1	1
8	Romang Polong	2	3	1
9	Bonto – Bontoa	2	1	1
10	kalegowa	1	2	1
11	Katangka	2	2	1
12	Tombolo	1	1	2
13	Paccinongan	0	3	2
14	Samata	1	2	3
15	Borongloe	1	1	4
16	Pangkabinanga	1	2	1
17	Mangalli	1	1	1
18	Tetebatu	1	2	0
19	Parangbanoa	1	2	1
20	Taeng	2	2	0
21	Bontoala	1	2	0
22	Je'netallasa	1	2	2
Jumlah		29	43	28

Sumber : Hasil Kuisisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat tentang adanya pengaruh tetangga menyebabkan perubahan fungsi lahan, 29 orang menyatakan tidak ada pengaruh, dalam artian mereka yang memiliki lahan pertanian tetap mempertahankan lahan miliknya dari perubahan

fungsi, sedangkan 43 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 28 orang menyatakan berpengaruh, mereka yang menyatakan berpengaruh beranggapan, tetangga mereka memiliki kehidupan yang lebih baik setelah lahannya terjual untuk dialih fungsikan menjadi lahan terbangun, sehingga mereka juga mengambil keputusan untuk segera menjual lahannya untuk dialihfungsikan. Adapun perhitungan skor akhir indikator pengaruh tetangga, dapat dilihat pada tabel 4.22:

Tabel 4.22

Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 29	29
KB	3 * 43	129
B	5 * 28	140
Jumlah Skor		298
		$298 / 500 = 0.596$ = 60 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

2) Karakteristik Pemilik Lahan

Karakteristik pemilik lahan merupakan salah satu faktor sosial budaya yang juga berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Karakteristik pemilik lahan merupakan alasan pemilik lahan untuk melepas lahan yang dimilikinya.

Tabel 4.23

Penilaian Responden Tentang Karakteristik Pemilik Lahan Terhadap
Perubahan Pemanfaatan Lahan

No	Desa/ Kelurahan	Karakteristik Pemilik Lahan	
		Lahan Tidak Produktif	Harga Lahan Meningkat
1	Pandang - Pandang	0	5
2	Sungguminasa	0	8
3	Tompobalang	0	4
4	Batangkaluku	0	5
5	Tamarunang	0	4
6	Bontoramba	1	3
7	Mawang	0	4
8	Romang Polong	0	6
9	Bonto – Bontoa	0	4
10	kalegowa	2	2
11	Katangka	1	4
12	Tombolo	0	4
13	Paccinongan	1	4
14	Samata	2	4
15	Borongloe	0	6
16	Pangkabinanga	1	3
17	Mangalli	1	2
18	Tetebatu	1	2
19	Parangbanoa	0	4
20	Taeng	0	4
21	Bontoala	0	3
22	Je'netallasa	1	4
Jumlah		11	89

Sumber : Hasil Kuisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden tentang karakteristik pemilik lahan, 11 orang menyatakan alasan pemilik lahan melepas lahannya dikarekan tidak lagi produktif, dan 89 orang menyatakan melepas lahannya untuk dialihfungsikan karena harga lahan yang

terus meningkat. Adapun perhitungan skor akhir indikator karakteristik pemilik lahan, dapat dilihat pada tabel 4.24:

Tabel 4.24
Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 11	11
B	5 * 445	445
Jumlah Skor		456
		456 / 500 = 0.912 = 91 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

e. Faktor Kebijakan

1) Perizinan Pemerintah

Perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa, berdasarkan penilaian responden dalam lingkup pemerintah setempat dan dinas terkait, pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Penilaian Responden (Pemerintah Setempat) Tentang Kebijakan Pemerintah

No	Pemerintah	Perizinan Pemerintah		
		Memberi Izin	Tidak Memberi Izin	Tergantung Pemilik Lahan
1	BPN Gowa	1	-	-
2	Dinas PU Gowa	1	-	-
3	Kantor Desa/ Kelurahan	-	-	3
Jumlah		2	0	3

Sumber : Hasil Kuisisioner Tahun 2015

Pihak Kelurahan/ Desa menyatakan bahwa perubahan lahan tergantung dari pemilik lahan itu sendiri, sedangkan pihak pemerintah

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa maupun Dinas Pekerjaan Umum bidang Tata Ruang tidak mengizinkan ketika pembangunan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Gowa dan RUTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa. Adapun penilaian masyarakat tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perubahan fungsi lahan dapat dilihat pada tabel 4.26.

Tabel 4.26
Penilaian Responden Tentang Kebijakan Pemerintah

No	Desa/ Kelurahan	Kebijakan Pemerintah		
		Tidak Ada Pengaruh	Kurang Berpengaruh	Ada Pengaruh
1	Pandang - Pandang	1	3	1
2	Sungguminasa	2	4	2
3	Tompobalang	2	1	1
4	Batangkaluku	1	2	2
5	Tamarunang	2	2	0
6	Bontoramba	1	2	1
7	Mawang	2	1	1
8	Romang Polong	2	3	1
9	Bonto – Bontoa	2	1	1
10	kalegowa	1	2	1
11	Katangka	2	2	1
12	Tombolo	1	1	2
13	Paccinongan	0	3	2
14	Samata	4	2	0
15	Borongloe	1	1	4
16	Pangkabinanga	1	2	1
17	Mangalli	1	1	1
18	Tetebatu	1	2	0
19	Parangbanoa	1	2	1
20	Taeng	2	2	0
21	Bontoala	1	2	0
22	Je'netallasa	1	2	2
Jumlah		32	43	25

Sumber : Hasil Kuisisioner Tahun 2015

Berdasarkan hasil penilaian responden, 29 orang menyatakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama ini tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi, 43 orang menyatakan kurang berpengaruh dan 28 orang menyatakan kebijakan pemerintah ada pengaruhnya, mereka beranggapan perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi selama ini telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perhitungan skor akhir variabel kebijakan pemerintah, dapat dilihat pada tabel 4.27:

Tabel 4.27
Perhitungan Skor Akhir

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
TB	1 * 32	32
KB	3 * 43	129
B	5 * 25	125
Jumlah Skor		286
		$286 / 500 = 0.572$ = 57 %

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

Setelah dilakukan perhitungan skor akhir pada masing-masing indikator setiap variable, maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan. Dapat dilihat pada tabel 4.28:

Tabel 4. 28**Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan**

No	Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pemanfaatan Lahan	Indikator	Nilai Hasil Akhir (%)	Standar Nilai Pengaruh (%)	Kesimpulan
1	Faktor Kebutuhan Lahan	Nilai jual lahan	74 %	66,67 – 100	Berpengaruh
		Lokasi lahan	78 %	66,67 – 100	Berpengaruh
2	Faktor Ekonomi	Mata pencaharian penduduk	63 %	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh
		Tingkat pendapatan penduduk	70 %	66,67 – 100	Berpengaruh
3	Faktor Sosial	Pengaruh Tetangga	60 %	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh
		Karakteristik Pemilik Lahan	91 %	66,67 – 100	Berpengaruh
4	Faktor Kebijakan	Perizinan / Kebijakan Pemerintah	57 %	33,34 – 66,66	Kurang Berpengaruh

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisis dan hasil rekapitulasi faktor-faktor penyebab perubahan fungsi lahan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa adalah:

1. Faktor kependudukan, dengan indikator pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan lahan untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Pada lokasi penelitian, laju perkembangan penduduk meningkat setiap tahunnya, jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya membutuhkan lahan baru, khususnya peruntukan permukiman sebagai tempat tinggal.

2. Faktor kebutuhan lahan, dengan indikator nilai jual lahan dan lokasi lahan. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya. Pada lokasi penelitian, nilai jual lahan yang terus meningkat setiap tahunnya membuat masyarakat semakin berminat menjual lahannya untuk selanjutnya dialihfungsikan. Selain itu, lokasi penelitian yang merupakan Kawasan Perkotaan dan berbatasan pula dengan Kota Makassar mendorong minat para pengembang untuk melakukan pembangunan sehingga membuat lahan-lahan pertanian pada lokasi penelitian terus berkurang.
3. Faktor ekonomi, dengan indikator tingkat pendapatan. Pada lokasi penelitian, masyarakat yang dominan menjual lahannya adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Faktor kebutuhan keluarga yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan atau lainnya) sementara tingkat pendapatan yang tergolong minim, seringkali membuat masyarakat (umumnya petani) tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahannya.

4. Faktor sosial, dengan indikator karakteristik pemilik lahan (alasan: harga lahan meningkat). Pada lokasi penelitian, lahan yang dianggap kurang memberi kontribusi terhadap keuangan keluarga menyebabkan lahan tersebut dijual apalagi harga lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi alasan utama sehingga lahan tersebut dijual untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Selanjutnya lahan yang telah terjual mengalami perkembangan fisik yang pada umumnya menjadi permukiman.

C. Tinjauan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Perkotaan Sungguminasa

1. Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Perkotaan Sungguminasa

Struktur tata ruang Perkotaan Sungguminasa didasarkan pada fungsi masing-masing Bagian wilayah Perkotaan (BWP) sehingga terjadi hubungan fungsional antara BWP yang saling mempengaruhi struktur perkembangan Kota dimasa yang akan datang. Fungsi masing-masing BWP didasarkan pada komponen-komponen pembentuk dari setiap BWP. Komponen yang dimaksud adalah pasar, kantor pemerintahan dan instansi lainnya, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, terminal dan sebagainya. Komponen-komponen ini yang menyebabkan terjadinya hubungan fungsional dari masing-masing BWP. Keserasian hubungan antara komponen inilah yang membentuk struktur tata ruang kota.

Struktur tata ruang kota terwujud dari adanya dua jenis fungsi kota, yaitu fungsi primer/dasar (F1) dan fungsi komplemen/sekunder (F2). Fungsi dasar terbentuk dari adanya kegiatan yang berorientasi pada sektor/aspek social ekonomi yang berskala atau tingkat pelayanan regional, sedangkan fungsi komplemen/sekunder terbentuk dari adanya kegiatan berorientasi pada sektor sosial ekonomi yang berskala kota/lokal.

2. Pembagian Kawasan Pengembangan Perkotaan Sungguminasa

Berdasarkan ketentuan RUTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa, kedudukan kota dan luas wilayah kota maka direncanakan wilayah Perkotaan Sungguminasa dibagi kedalam 7 (tujuh) bagian Wilayah Perkotaan (BWP), dimana setiap BWP masing-masing mempunyai pusat pelayanan unit Perkotaan kecuali BWP yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sama atau pusat kota. Dapat dilihat pada tabel 4.29, Rencana pembagian Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa.

Tabel 4. 29

Rencana Pembagian Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Perkotaan Sungguminasa

BWP	Kelurahan/ Desa	Jumlah/ Jenis Pusat Pelayanan
A	Sungguminasa, Katangka, Kalegowa, Pandang-Pandang dan Bonto-Bontoa	Pusat pelayanan kota
B	Tombolo, Paccinongang, Samata dan Romang Polong	1 Pusat pelayanan BWP
C	Tompo Balang, Batangkaluku dan Tamarunang	1 Pusat pelayanan BWP
D	Bontoramba dan Mawang	1 Pusat pelayanan BWP
E	Borongloe	1 Pusat pelayanan BWP
F	Bontoala, jenetallasa dan Taeng	1 Pusat pelayanan BWP
G	Pangkabinanga, Tetebaru, dan Parangbanoa.	1 Pusat pelayanan BWP

Sumber : RUTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa

Sedangkan pembagian fungsi Kawasan Perkotaan Sungguminasa terdiri dari fungsi primer dan fungsi Sekunder. Fungsi primer adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan kota dan wilayah pengembangannya. Sedangkan fungsi sekunder adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduk.

Berdasarkan arahan fungsi pelayanan dan pengertian fungsi pelayanan diatas maka Perkotaan Sungguminasa kedepan diarahkan mempunyai fungsi pelayanan yang berkaitan dengan skala pelayanan kegiatan kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana fungsi pelayanan tiap BWP, dapat dilihat pada tabel 4.30 dan rencana fungsi ruang pada tiap BWP pada tabel 4.31.

Tabel 4. 30
Rencana Fungsi Pelayanan Tiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
Perkotaan Sungguminasa

BWP	Fungsi Pelayanan	
	Fungsi Primer	Fungsi Sekunder
A	Perdagangan, pemerintahan dan wisata	Rekreasi dan Olahraga, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, peribadatan
B	Pendidikan dan kesehatan	Rekreasi dan olahraga, pemerintahan, perdagangan dan peribadatan
C	Pendidikan dan pelatihan dan peternakan	Perdagangan, kesehatan, perangkutan, pemerintahan
D	Pergudangan dan rekreasi wisata	Pendidikan, rekreasi dan perdagangan
E	Pendidikan	Perdagangan, pemerintahan, olah raga dan rekreasi, peribadatan
F	Perangkutan dan Wisata Budaya	Pendidikan dan perdagangan
G	Rekreasi dan Olahraga	Kesehatan, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, peribadatan.

Sumber : RUTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa

Tabel 4. 31

Rencana Fungsi Ruang Tiap Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
Perkotaan Sungguminasa

BWP	Fungsi-Fungsi Ruang (Pemanfaatan Ruang)	
	Fungsi Primer Pengembangan	Fungsi Sekunder Pengembangan
A	Perdagangan dan jasa, pemerintahan dan pertokoan	Perumahan, cagar budaya, <i>sport centre</i> , gedung olah raga.
B	Perumahan, pertanian (Sebagai lahan cadangan), kawasan industri kecil dan pendidikan	Ruang terbuka, rekreasi, pendidikan, pekuburan umum, Perdagangan, kesehatan.
C	Perumahan, perdagangan dan jasa	Kesehatan, terminal kota, rumah potong hewan dan karantina/penggemukan hewan potong, pendidikan/ pelatihan dan perkantoran dan sosial.
D	Perumahan, rekreasi dan wisata dan kawasan pertanian (sebagai lahan cadangan)	Pergudangan perkantoran dan sosial.
E	Perumahan dan Pendidikan	Industri, perdagangan, perkantoran dan sosial.
F	Perumahan dan Pertanian (sebagai lahan cadangan)	Terminal regional, kawasan atraksi budaya, perdagangan dan sosial.
G	Perumahan dan Pertanian (sebagai lahan cadangan)	Olahraga, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan social.

Sumber: RUTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa

D. Tinjauan Al – Qur'an Terhadap Pemanfaatan Lahan

Sebagaimana firman Allah SWT.. dalam QS. al- Hijr / 15 :19-20.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

“dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.”

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa Dia telah memberikan nikmat kepada manusia dengan menghamparkan bumi beserta isinya dan menyebutkan bahwa seluruh alam semesta dari gunung hingga lautan tercipta sesuai takaran yang tepat dan bukan terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, Allah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Selain manusia, terdapat makhluk lain yang hidup dimuka bumi ini dan Allah memberikan rezeki kepada mereka dan memenuhi keperluannya.

Manusia berasal dari tanah dan hidup dari dan di atas tanah. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat. Kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah dan sebaliknya, tanahpun memerlukan perlindungan

manusia untuk eksistensinya sebagai tanah yang memiliki fungsi. Allah swt. berfirman dalam QS. Asy Syu'araa' / 26 : 7-8.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?.

8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman.”

Dengan lahan itu manusia bisa membuat tempat tinggal, bercocok tanam, dan melakukan aktivitas lainnya. Namun, melihat kondisi yang ada dimana dalam perluasan kota, mengambil tanah-tanah subur pedesaan. Alih fungsi lahan dilakukan tanpa melihat pentingnya lahan pertanian bagi kehidupan para petani dan kebutuhan pangan masyarakat pada umumnya.

Dalam ayat lain Allah swt. juga menjelaskan bumi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Mulk / 67 : 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam ayat ini Allah swt. juga menjelaskan bahwa Dia telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan seperlunya, sebab lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi akan mengalami gangguan.

Oleh karena itu, pembangunan pada hakekatnya untuk pengubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah swt. berfirman dalam QS. Huud / 11 : 61.

وَالِىْ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يَنْقُوْمِرْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَاَكُمْ

مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

"dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-Rum / 30 : 41-42 .

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji. Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang. Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda (dam). Lebih dari itu Allah swt. melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini juga di tegaskan Allah swt. dalam QS. Al- A'raaf / 7 : 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya.

Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Qur'an seperti

dipaparkan di atas, Rasulullah saw. memberikan teladan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadist-Hadist Nabi, seperti Hadist tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, al-intifa'. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-i'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam:

a. Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect For Nature*)

Di dalam Al Qur'an surat Al-Anbiya / 21 : 107, Allah SWT.. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Rahmatan lil alamin merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia,

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility For Nature*)

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah / 2 : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

c. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta.

d. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam (*Caring For Nature*)

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Sebagaimana dimuat dalam sebuah Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Shakhiahain:

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

e. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan / 55 : 1–12 :

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

۞ وَالْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞
 وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞

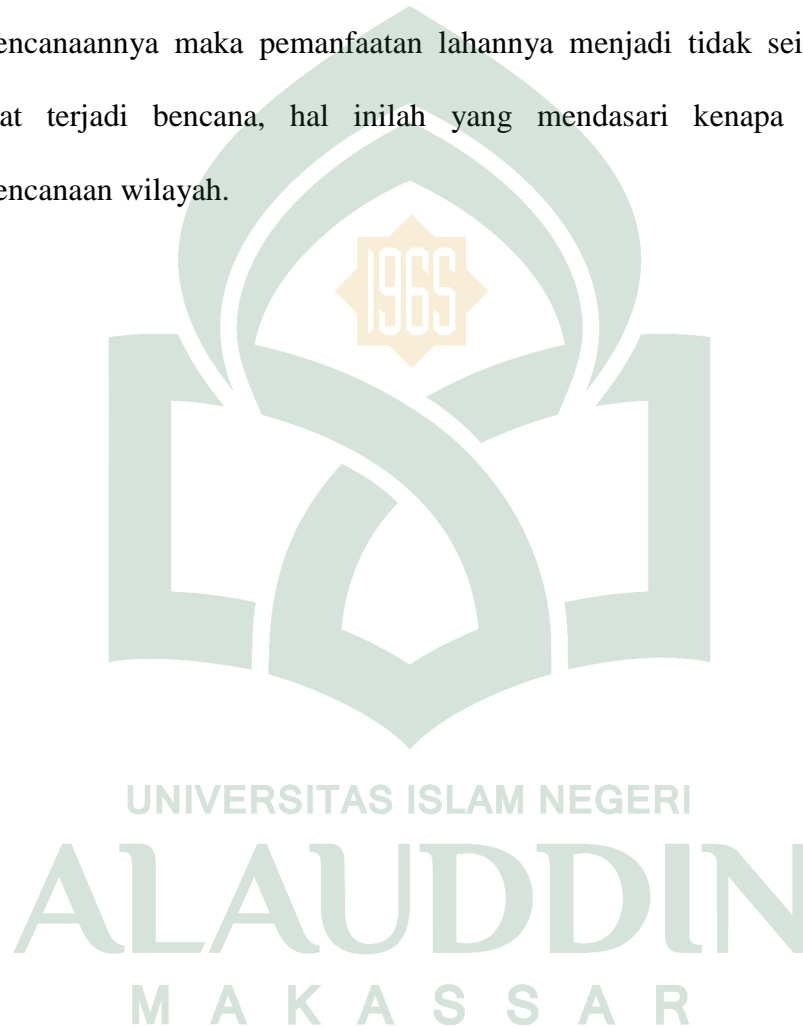
Terjemahnya:

“(Tuhan) yang Maha pemurah. Yang Telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada nya. Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah Telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.”

Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup). Allah telah memberikan tuntunan dalam Al-Quran tentang lingkungan hidup.

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebahai khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).

Hal ini pun menjadi patokan sebuah perencanaan ketika sebuah rencana tata ruang dibuat untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan lahan 20 tahun ke depannya. Ketika wilayah yang direncanakan tidak sesuai dengan perencanaannya maka pemanfaatan lahannya menjadi tidak seimbang dan dapat terjadi bencana, hal inilah yang mendasari kenapa dibutuhkan perencanaan wilayah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah maupun tujuan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa terjadi perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman. Perubahan lahan menjadi permukiman didominasi oleh para pengembang yang membangun perumahan-perumahan baru sebagai kebutuhan tempat tinggal dengan menyediakan aksesibilitas sebagai penunjang perumahan tersebut. Adanya perumahan-perumahan baru tersebut kemudian diikuti pembangunan rumah-rumah penduduk disekitarnya. Pembangunan perumahan yang terus dilakukan membuat lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai pertanian terus berkurang, apalagi lahan pertanian tersebut merupakan lahan produktif, kondisi ini tentunya berpengaruh besar terhadap produktivitas hasil pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa.
2. Adapun penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Sungguminasa adalah:

- a. Faktor kependudukan, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun, tentunya membutuhkan lahan, sehingga faktor kependudukan berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan.
- b. Faktor kebutuhan lahan dengan indikator nilai lahan memiliki nilai 74 % yang berarti berpengaruh dan lokasi lahan memiliki nilai 78 % yang juga berarti berpengaruh.
- c. Faktor ekonomi dengan indikator tingkat pendapatan memiliki nilai 70 % yang berarti berpengaruh.
- d. Faktor sosial dengan indikator karakteristik pemilik lahan (Harga lahan meningkat) memiliki nilai 91 % yang berarti berpengaruh.

B. Saran

1. Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap perizinan dari pemerintah sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan fungsi kawasannya
2. Bagi pemerintah Kabupaten Gowa agar dapat menertibkan perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya di Kawasan Perkotaan Sungguminaa.
3. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat mempertajam bahasan penelitian, seperti pengaruh perizinan terhadap perubahan pemanfaatan lahan, pengaruh perubahan fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadri,, 1999, ***Tiga Pilar pengembangan Wilayah***. Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015, ***Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2015***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015, ***Kecamatan Somba Opu Dalam Angka Tahun 2015***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015, ***Kecamatan Pallangga Dalam Angka Tahun 2015***.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015, ***Kecamatan Bontomarannu Dalam Angka Tahun 2015***.
- Departemen Agama, 1990, ***Al Qur'an dan Terjemahnya***, Jakarta : Departemen Agama.
- Kustiawan A., 1997, ***Konversi Lahan Pertanian Di Pantai Utara Jawa***. Prisma No 1 Tahun XXVII Januari 1197. LP3ES, Jakarta.
- Lampiran Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Kriteria Umum Kawasan Perkotaan
- Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 - 2032
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang RUTR Kota Sungguminasa
- Situmeang M., 1998, ***Pola Hubungan Antara Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Transformasi Struktur Ekonomi***. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sumaryanto dan Tahlim S., 2005, ***Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya***. Prosiding seminar penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi. Satyawan *Et al.* Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Supardi.I, 1994. ***Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya***. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tjahja. S, 2000. ***Konsep Pembangunan Yang Melakukan Pendekatan Kemanusiaan***, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Utomo., 1992, ***Alih Fungsi Lahan: Tinjauan Analitis***, Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung, Lampung.

UIN Alauddin Makassar, 2013, ***Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah***, Alauddin Press, Makassar.

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kawasan Perkotaan

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Yunus, H.S., ***Dinamika Wilayah Peri Urban-Determinan Masa Depan Kota***. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Restu Yusuf, ST lahir di Kabupaten Takalar pada 25 April 1994 dan merupakan anak ke-4 dari 5 bersaudara dari pasangan H. Masurung Nassa, SH dan Hj. ST. Rohani, BA yang menetap di Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar. Restu mengenyam pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 1998-1999 di TK Andika Takalar selama sebulan kemudian berpindah ke TK YAPTA Takalar. Setelah itu kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD. Inp. Takalar Kota pada tahun 1999 - 2005, dan melanjutkan lagi pendidikan tingkat menengah di SMPN 2 Takalar pada tahun 2005-2008. Selanjutnya untuk tingkat menengah atas, dilanjutkan di SMAN 1 Takalar pada tahun 2008-2011. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2011-2016 dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 4 tahun 4 bulan.

M A K A S S A R